

# PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berbasis Sustainable Development Goals



**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si.**  
**Dr. Budi Setiadi, Drs., M.Si.**  
**R. Rindu Garvera, S.IP., M.Si**  
**Ii Sujai, S.IP., M.Si**  
**Dini Yuliani, S.IP., M.Si.**  
**Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.**  
**Regi Refian Garis, S.IP., M.Si**



**Pembangunan Desa dan Pemberdayaan  
Masyarakat**  
Berbasis Sustainable Development Goals

# **Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

**Berbasis Sustainable Development Goals**

---

---

**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si.**

**Dr. Budi Setiadi, Drs., M.Si.**

**R. Rindu Garvera, S.IP.,M.Si**

**Ii Sujai, S.IP.,M.Si**

**Dini Yuliani, S.IP., M.Si.**

**Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.**

**Regi Refian Garis, S.IP., M.Si**



# **Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat**

## **Berbasis Sustainable Development Goals**

---

---

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Dr. Hj. Kiki Endah, S.Sos., M.Si.**

**Dr. Budi Setiadi, Drs., M.Si.**

**R. Rindu Garvera, S.IP., M.Si**

**Ii Sujai, S.IP., M.Si**

**Dini Yuliani, S.IP., M.Si.**

**Irfan Nursetiawan, S.Pd., M.Pd., M.Si.**

**Regi Refian Garis, S.IP., M.Si**

Editor: Yudi Umara, M.Pd.

Cetakan Pertama: Oktober 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia**

**ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: [www.rcipress.rcipublisher.org](http://www.rcipress.rcipublisher.org)

E-mail: [rumahcemerlangindonesia@gmail.com](mailto:rumahcemerlangindonesia@gmail.com)

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I --: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023

Dimensi : 14,8 x 21 cm

**ISBN 978-623-448-692-6**

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

**Hak Cipta Pasal 72**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta  
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sustainable Development Goals.

Selama persiapan, sampai penyusunan buku ini, kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, karena itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini.

Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada kami selama penyusunan dokumen ini.

Ciamis, Oktober 2023

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB 1 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING .....	4
BAB 2 SOSIALISASI STUNTING OLEH BKKBN KEPADA KADER POSYANDU DESA.....	17
BAB 3 PERAN KUESIONER KELUARGA DALAM PENGUMPULAN DATA DESA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....	25
BAB 4 EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA.....	32
BAB 5 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA PUSAKANAGARA .....	46
BAB 6 PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAJADI.....	57
BAB 7 PEMANFAATAN POTENSI DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA UTAMA.....	68
BAB 8 PERAN KADER POSYANDU TERHADAP PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	79
BAB 9 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UMKM DAN PEMBANGUNAN DESA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS.....	89

BAB 10 PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS .....	101
BAB 11 PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PEMASARAN .....	116
BAB 12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DESA KERTAHARJA.....	125
BAB 13 PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DI DESA BENDASARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS .....	132
BAB 14 IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> .....	145



# **BAB 1**

## **STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Dalam era digitalisasi ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mengadopsi strategi pengembangan yang berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam konteks ini, kajian ilmu pemerintahan memiliki peran penting dalam menganalisis strategi pengembangan UMKM melalui digital marketing dan implikasinya terhadap daya saing di pasaran. UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian global maupun lokal. Mereka menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan yang kompleks dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar dan transnational. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang berbasis digital marketing menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing dan kelangsungan bisnis UMKM.

Hadirnya teknologi digital berdampak positif dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah pada dunia bisnis. Teknologi berperan penting dalam rangka mengembangkan

UMKM menjadi lebih baik lagi. Pesatnya perkembangan teknologi menuntut pelaku usaha mulai untuk mengenal dan selalu terkait dengan internet. Salah satu contoh nyata yaitu digital marketing.

Upaya dari strategi digital marketing mempengaruhi hingga 78 persen terhadap keunggulan berkompetisi UMKM di dalam memasarkan produk lokal. Pelaku bisnis dapat juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana marketing digital. Biaya yang tidak begitu besar menjadi harapan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah agar mampu berkembang dan menjadi pusat kekuatan dalam ekonomi.(Saifullah, 2015; Wardhana, 2015).

Studi tentang strategi pemasaran berbasis Teknologi informasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan daya saing belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Menurut M. Tajudin, Abdul Manan dan Ahmad adil (2011) Menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang Melandasi UMKM terdorong menggunakan e-commerce terdiri dari 6 faktor yaitu dapat mengakses pasar global, mempromosikan produk, membangun merek, mendekatkan dengan pelanggan, membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan dan memuaskan pelanggan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini ingin mencoba mengembangkan penelitian yang sudah ada tersebut dengan membuat model pengembangan strategi pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis digital marketing diharapkan dapat membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya saing di pasaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan teknologi untuk

kegiatan usahanya serta merumuskan dan menyusun model pengembangan strategi pemasaran berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Petirhilir

Desa Petirhilir merupakan salah satu Desa di Kabupaten Ciamis yang memiliki penguatan terhadap UMKM, dibuktikan dengan data dari pemerintah Desa bahwa ada 22 pelaku UMKM di Desa Petirhilir. Adapun sektor UMKM unggulan di Desa Petirhilir ini dari sub-sektor kuliner, yaitu makanan ringan seperti usaha keripik pisang dan sukun.

Pada saat ini, UMKM keripik pisang dan sukun ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan salah satunya dari segi pemasaran. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini, pemasaran produk dapat dikembangkan dalam bentuk online salah satunya melalui platform media sosial. Ini sebagai strategi dari pengembangan pemasaran produk UMKM. Dalam platform media sosial, produk dapat dipasarkan secara luas tidak hanya dalam wilayah desa, hal tersebut diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pemasaran dari pelaku UMKM tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Strategi**

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, Konsep mengenai strategi terus berkembang. Menurut Chandler (Rangkuti, 1997:3), Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan panjang, program tindak lanjut, seta prioritas alokasi sumber daya.

Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner (Rangkuti, 1997:4), strategi Merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan Ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi Organisasi. Adapun alat formulasi strategi adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) menurut (Rangkuti, 1997:19) analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) adalah identifikasi berbagai faktor secara Sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat Memaksimalkan *Strengths* (Kekuatan) dan *Opportunities* (Peluang), namun secara Bersamaan dapat meminimalkan *Weaknesses* (Kelemahan) dan *Threats* (ancaman).

## **2. UMKM**

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang Perorangan dan/atau badan usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta – 500 Juta, kriteria Omzet: 300 juta – 2,5 Miliar Rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, Yang dilakukan oleh orang, perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah.

### **3. Digital Marketing**

Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat.

Sedangkan menurut ahli, Menurut Sanjaya dan Tarigan (2009:47) Digital Marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, e-mail, adwords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Pendapat lain menurut Dibussi Tande, digital marketing adalah teknik pemasaran produk atau jasa yang menggunakan media digital. Termasuk internet, perangkat seluler, dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan pemasaran.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan.. Wawancara tersebut meliputi perangkat Desa serta pelaku UMKM yang ada

di Desa Petirhilir. Selain melakukan wawancara juga melakukan observasi dan dokumentasi. Dimana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap penting, observasi ini dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM Desa Petirhilir. Dan yang terakhir dengan menggunakan dokumentasi, dimana dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan gambar

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering di singkat (UMKM) ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah. Menurut Tambunan, (2013) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Di Desa Petirhilir sendiri jumlah pelaku UMKM berjumlah 22 orang, dengan terbagi atas beberapa sub-bidang seperti bidang kuliner, kriya, seni rupa dan fashion.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya; meminta data UMKM, sosialisasi penjualan online, membuat akun online shop hingga menjual dengan metode online. Kegiatan praktikum ini dilakukan langsung di Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Adapun uraian lengkapnya sebagai berikut:

### **1. Data pelaku UMKM di Desa Petirhilir**

Praktek mata kuliah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat ini, tahap pertama yang peneliti lakukan yaitu meminta beberapa data pelaku Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah atau UMKM yang ada di Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Adapun data pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut diantaranya yaitu:

**Tabel 1. Data Pelaku UMKM**

No	Nama Pengusaha	Nama Perusahaan	Kabupaten	No Hp	Sub Sektor
1	Maria Ulfah	Warung Mamah Rafka	Ciamis	-	Kuliner
2	Lina Marlina	Sangkan Hurip	Ciamis	-	Kuliner
3	Feri Heryandi	Hidayah Archeri Club	Ciamis	-	Kriya
4	Agus Setiawan	Baso Idola	Ciamis	-	Kuliner
5	Enceng	Purnama	Ciamis	-	Kuliner
6	Bubun	Qoqod	Ciamis	-	Fashion
7	Kamaludin	Ridho Putra	Ciamis	-	Kuliner
8	Kurniasih	Kube Kinanti	Ciamis	-	Kuliner
9	Jeje Khoirul	Bina Putra	Ciamis	-	Kriya
10	Nanang	Cowet Ruyung	Ciamis	-	Kriya
11	Aep	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
12	Elon	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
13	Muhamad Iqbal	Art House	Ciamis	-	Seni Rupa
14	Jejen	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
15	Jajat	CV IZHHI MF	Ciamis	-	Kuliner
16	Yuda Yusuf	Pure Fresh	Ciamis	-	Kuliner
17	Dani Wildan	Shoopera	Ciamis	-	-
18	Wida	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
19	Ade Atilkah	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
20	Neli	Andalas Tailor	Ciamis	-	Fashion
21	Aep Saeful	Makanan Ringan	Ciamis	-	Kuliner
22	Wawan	Joran Pancing	Ciamis	-	Kriya

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa di Desa Petirhilir jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu berjumlah 22 orang. Dimana UMKM tersebut dibagi dalam beberapa sub bidang diantaranya, dalam sub bidang kuliner berjumlah 14 orang, sub bidang kriya berjumlah 4 orang, sub bidang fashion berjumlah 2 orang, dan sub bidang seni rupa berjumlah 1 orang.

Dari data pelaku UMKM tersebut, peneliti memilih salah satu UMKM yang ada di Desa Petirhilir, untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Peneliti memilih UMKM produksi keripik pisang dan sukuk, yang dikelola oleh Bapak Elon dengan nama produksi “Abadi Sejahtera”. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) milik Pak Elon ini, termasuk ke dalam UMKM bidang makanan ringan.

Dalam produksinya Pak Elon memperkerjakan 10 orang yang berasal dari Desa Petirhilir. Dengan rincian 6 orang bertugas membelah pisang/sukun, 2 orang memasak dan 2 orang lagi membungkus keripik ke dalam plastik. Hal tersebut tentu membuka peluang kerja bagi masyarakat Desa Petirhilir, sehingga nantinya dapat meminimalisir atau mengurangi terjadinya pengangguran yang ada di Desa Petirhilir.

## **2. Digital Marketing**

Di era teknologi sekarang ini, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus berinovasi dalam produk, jasa, teknologi dan perluasan area pemasaran. Perluasan area pemasaran tersebut, bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan aplikasi Instagram dan Facebook sebagai media penjualan online. Karena dengan menggunakan aplikasi tersebut, pelaku UMKM dapat melakukan promosi lebih efektif, efisien dan tentunya ramah lingkungan. Adapun tampilan akun Facebook dan Instagram yang peneliti buat seperti gambar dibawah ini:



kripikabadisejahtera ▾ • ⊕ ☰



12 Postingan    10 Pengikut    28 Mengikuti

**Kripikabadisejahtera**

Owner : Bapak Elon

📍 Desa Petirhilir Dusun Pasirkadu RT 02 RW 06  
"Menjual Aneka Kripik"

Edit profil

Bagikan profil



### **Gambar 1. Akun Instagram**

Akun instagram diatas merupakan salah satu platform penjualan online, yang direkomendasikan oleh peneliti, untuk mengoptimalkan penjualan dan perluasan pemasaran bagi produksi keripik pisang dan sukun milik Pak Elon. Sebagai salah satu platform media sosial terbesar, instagram punya banyak manfaat untuk meningkatkan bisnis. Salah satunya bisa digunakan untuk mempromosikan produk, meningkatkan penjualan secara langsung serta dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan. Selain membuat akun instagram, peneliti pun merekomendasikan aplikasi Facebook untuk menjadi salah satu metode penjualan online, bagi produksi keripik milik Pak Elon. Adapun tampilan akun facebook, seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 2. Akun Facebook**

Akun facebook diatas merupakan platform penjualan online, yang dapat digunakan oleh Pak Elon untuk meningkatkan pemasaran, Karena aplikasi Facebook tersebut mempunyai beberapa manfaat diantaranya: menjangkau target pasar lebih luas, meningkatkan popularitas brand dan target konsumen yang luas.

Setelah melakukan observasi dan juga wawancara kepada pemilik UMKM keripik “Abadi Sejahtera” yaitu Bapak Elon. Peneliti mendapatkan kesimpulan, bahwa penjualan keripik “Abadi Sejahtera” masih menggunakan media penjualan konvensional dan belum menginjak ranah penjualan online. Sehingga peneliti pun membantu membuat akun penjualan online yaitu Facebook dan Instagram. Melihat jumlah pengguna Facebook dan Instagram saat ini sangat banyak digunakan. Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna Instagram global mencapai 1,32 miliar per Januari 2023 sedangkan jumlah pengguna Facebook memiliki 1.98 miliar pengguna di dunia pada Januari 2023. Sehingga hal tersebut

menjadi salah satu alasan peneliti memilih kedua aplikasi tersebut, untuk dijadikan sebagai media penjualan online dari produksi keripik pisang dan sukun, yang dimiliki oleh Bapak Elon. Semoga dengan adanya aplikasi tersebut dapat memperluas pemasaran dan promosi lebih efektif, efisien dan tentunya ramah lingkungan.

Selain membuat aplikasi penjualan online, peneliti membantu membuat design baru dari produk keripik pisang dan sukun milik Bapak Elon. Pembuatan design baru ini bertujuan agar design keripik lebih menarik dan variatif, sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. Adapun tampilan design baru yang kami buat seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 3. Design Produk**

Pembuatan design baru ini sebagai bentuk inisiatif dari peneliti, untuk membantu Pak Elon, agar design dalam kemasannya lebih menarik dan variatif. Branding adalah proses yang memperkuat penempatan merek dipasar. Manfaat branding sendiri menurut (Destrina, et al., 2022) dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas dan unsur-unsur produk, serta dapat membantu UMKM tumbuh dan dikenal masyarakat umum. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan daya saing di pasaran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang dapat disimpulkan bahwa:

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Petirhilir berjumlah 22 orang. Dimana UMKM tersebut dibagi dalam beberapa sub bidang diantaranya, dalam sub bidang kuliner berjumlah 14 orang, sub bidang kriya berjumlah 4 orang, sub bidang fashion berjumlah 2 orang, dan sub bidang seni rupa berjumlah 1 orang. Dari banyaknya UMKM di Desa Petirhilir, kebanyakan masih menggunakan media penjualan konvensional belum memasuki ranah penjualan secara online. Sehingga pembelinya hanya sebatas warga Desa saja.

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya strategi dan inovasi untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran. marketing. Menurut Sanjaya dan Tarigan (2009:47) Digital Marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, e-mail, adwords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Adapun dari inovasi tersebut peneliti membantu membuat akun penjualan online yaitu Facebook dan Instagram.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Pemasaran digital*. Pearson uk
- Hasri, B., Santoso, S., & Santosa, D. (2014). Analisis pengembangan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya

pengentasan kemiskinan dan pengangguran daerah di kabupaten Ngawi.

Pambudi, RSP (2021). Strategi Pemasaran di Marketplace Facebook. Strategi Pemasaran Dalam Marketplace Facebook .

Riyoko, S., &Lofian, B. (2020). Model Pengembangan Strategi Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Jepara. E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 21(2), 113-120

Untari, D., & Fajariana, D. E. (2018). Strategi pemasaran melalui media sosial instagram (studi deskriptif pada akun@subur\_batik). Widya Cipta: Jurnal Sekretaris Dan Manajemen, 2(2), 271-278.

Widiyaningrum, W. Y. (2020). Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 1(2), 18-33

# **BAB 2**

## **SOSIALISASI STUNTING OLEH BKKBN KEPADA KADER POSYANDU DESA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Praktikum mata kuliah Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat ini dilakukan dengan diadakannya pembekalan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktikumnya dan kemudian mengharuskan mahasiswa untuk memahami adanya Capaian dari tema praktikum mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa ini. Adapun praktikum Dalam rangka mencapai tujuan penelitian SDGs ini yaitu bertujuan untuk: Melatih mahasiswa agar Mampu mengelola bidang pemerintahan untuk mendukung tugas di bawah tanggung jawabnya, dan Melatih mahasiswa agar mampu menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta peran lembaga desa.

Pembangunan yang sering sekali didefinisikan dengan perubahan menuju kearah yang lebih baik ternyata memiliki banyak indikator agar kenyataan dilapangan sesuai dengan definisinya mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang lebih baik, rendahnya tingkat kesenjangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga Negara. Strategi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan meupakan bagian tugas dalam menjalankan, baik pemerintahan pusat Daerah maupun perdesaan.

## **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan untuk tahap pengumpulan data kami menggunakan tahapan Observasi, dan Studi Pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang kita ketahui bahwa Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam deskripsi penelitian ini disajikan data penelitian yang didapat berupa hasil observasi, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan pada saat Pemantauan atas apa – apa saja yang menjadi unggulan dari hasil data SDGs dalam mensejahterakan masyarakat Desa Baregbeg. dokumentasi digunakan untuk cross check data hasil observasi. Dokumentasi yang digunakan antara lain berupa vidio dan foto objek yang menjadi keunggulan dari data SDGs Desa Baregbeg.

Pada praktikum di Desa Baregbeg kali ini Kami berfokus pada salah satu capaian SDGs ke 6 tentang “Desa Ramah Perempuan” pada poin Keterlibatan perempuan dalam pengoptimalan SDGs sesuai dengan pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Dengan ini, Kami melakukan Sosialisasi dan Bekerjasama bersama pemerintah Desa Baregbeg dan Dinas BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan dihadiri oleh audience ibu-ibu Kader Posyandu dari 10 Posyandu di Desa Baregbeg. Pada kegiatan Sosialisasi ini kami mengambil tema “Cegah Stunting Sedini Mungkin” .

Menurut Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021, Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jika belum bisa membayangkan bagaimana anak yang mengalami stunting, ciri-ciri berikut bisa memberikan gambaran lebih jelas:

1. Tinggi badan anak lebih pendek dibanding dengan anak seusianya;
2. Sering mengalami gangguan kesehatan/sakit-sakitan;
3. Terkadang nampak lemas.

Stunting menjadi masalah yang cukup serius karena berdampak panjang. Masalah ini tidak hanya memengaruhi kehidupan individu, namun juga kehidupan masyarakat/negara. Anak yang mengalami stunting cenderung sering sakit-sakitan, mengalami penurunan kemampuan kognitif, perkembangan fungsi tubuh tidak seimbang, juga postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Bayangkan,



jika anak mengalami stunting, ia akan sering sakit-sakitan. Dengan demikian, orang tua akan menghabiskan uang untuk kesehatan anaknya. Hal ini tentu akan mengganggu perekonomian keluarga. Pada tingkat yang lebih tinggi, pembiayaan kesehatan otomatis terkuras. Anak yang sering sakit-sakitan juga mengalami gangguan tumbuh kembang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, stunting menyebabkan perkembangan kognitif terganggu. Kemampuan kognitif adalah kemampuan manusia berpikir secara rasional. Contoh kegiatan yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Maka bisa diprediksi, anak yang stunting mengalami kelambatan kognitif atau kesulitan dalam belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Konsekuensinya, besar kemungkinan mereka drop out dari sekolah. Dengan tingkat pendidikan yang kurang/rendah tersebut maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak turut berkurang.

Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan dan tentunya relevan juga dengan capaian SDGs ke 6 tentang “Desa Ramah Perempuan” pada poin Keterlibatan perempuan dalam pengoptimalan SDGs.

Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga mencapai 40% pada tahun 2025 (WHO, 2016). Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari standar deviasi (SD)

berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (WHO, 2018).

Penyebab dari Stunting diantaranya adalah faktor dari lingkungan seperti sanitasi yang buruk karena dapat menyebabkan penyakit contohnya diare yang terjadi cukup lama dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi pada proses pencernaan, faktor dari ibu seperti ibu hamil dengan Kurang Energi Kronik (KEK) dan kurangnya asupan nutrisi saat hamil, serta faktor dari bayi dan balita yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) (Kemenkes, 2018).

Stunting juga disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang berkembang dalam jangka panjang, di antaranya kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, mengalami masalah pertumbuhan janin saat kehamilan, kebutuhan protein tidak tercukupi sesuai proporsi total kalori, adanya perubahan hormon akibat stres, sering mengalami infeksi pada awal kehidupan anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Menurut WHO, stunting disebabkan oleh kumulasi episode stress yang sudah berlangsung lama yang kemudian tidak terimbangi oleh catch up growth (kejar tumbuh) (WHO, 2013).

## **KESIMPULAN**

Pembangunan menjadi indikator bagi negara-negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dilain sisi pembangunan sering kali menimbulkan dampak-dampak negatif yang berdampak pada jangka panjang dan kehidupan di dunia. Dengan berbagai permasalahan yang kompleks dan tantangan-tantangan yang muncul. Oleh karena itu para pemimpin dunia berkomitmen untuk membuat kebijakan-

kebijakan agenda pembangunan global yang dijadikan acuan dalam melakukan pembangunan nasional. sehingga tantangan-tantangan pembangunan di setiap negara dapat diselesaikan dan tujuan pembangunan global dapat dirasakan merata oleh negara-negara lainnya. Pada tahun 2015 para pemimpin-pemimpin negara menyepakati komitmen agenda pembangunan global yang dikenal dengan sustainable development goals (SDGs). Dan SDGs ini diadaptasi menjadi lebih sederhana dengan nama SDGs Desa. Adapun partisipasi SDGs Desa di Pemerintahan Desa Baregbeg dapat terlihat dari :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat bahwa masyarakat Desa Baregbeg cukup tanggap dalam memahami permasalahan di desanya. meskipun pada kenyataannya dalam setiap rapat musrembang lebih didominasi tokoh masyarakat.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga dan uang. namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memberikan partisipasinya karena sepenuhnya biaya pembangunan diserahkan kepada pihak pemerintah.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada upaya pemeliharaan dan merawat hasil pembangunan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki tanggungjawab akan aset pembangunan desa
- 4) Partisipasi dalam evaluasi dapat terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil pembangunan. pemerintah desa melalui wadah rapat evaluasi hasil pembangunan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai

ketercapaian program sebagai upaya mengatasi masalah. masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap kinerja pemerintah dalam merangkul program pembangunan.

Adanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desanya. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai dan tidak transparan. Diharapkan pemerintah desa baregbeg kedepannya lebih baik lagi terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peran pemerintahan desa dalam Pencegahan Stunting yang berhubungan secara langsung dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137-139.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & child nutrition*, 14(4), e12617.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintahan desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 463-476.

- Husain, N., Rohandi, M., Latief, M., Mulyanto, A., Bouty, A. A., & Kadim, A. A. (2022). Pendampingan masyarakat Desa Lakeya dalam Pencapaian SDGs Desa. *Devotion: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 1(2), 31-37.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam*, 14(1), 19-28.
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*. Geneva: WHO. 2014; p.1-6. 1-2.

# **BAB 3**

## **PERAN KUESIONER KELUARGA DALAM PENGUMPULAN DATA DESA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertindak sebagai cetak biru bagi negara-negara untuk bergerak maju dan mengakhiri kemiskinan. Dengan 17 Tujuan, SDGs bertujuan untuk mengatasi masalah global dengan mempertimbangkan manusia, planet, perdamaian, dan kemakmuran. Pada Momen SDGs 2021, pembaruan terkini tentang kemajuan berfungsi sebagai pemeriksaan realitas bahwa dunia perlu melakukan jauh lebih baik di semua tingkatan: global, nasional, lokal, dan individu . Sejak penerbitan cetak biru 2030, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah dipromosikan sebagai proyek global. Banyak langkah telah diambil; namun, sampai saat ini pencapaiannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang SDGs dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti desa.

Desa diharapkan dapat menyumbang tercapainya SDGs di Indonesia karena memiliki sumber daya dan potensi besar dengan didukung dana desa. Sehingga melahirkan gagasan untuk melokalkan SDGs menjadi SDGs Desa. Upaya untuk memajukan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 telah diterbitkan.

Peraturan ini mengatur Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bagian penting dalam peraturan ini adalah mengenai pendataan awal dan pemutakhiran data desa yang didasarkan pada Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Tujuan pendataan ini adalah untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa, data dikumpulkan dari seluruh wilayah desa dan tingkat rumah tangga (RT), serta mencakup pengumpulan data dari setiap keluarga dan warga desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SDGs Desa mencakup wilayah kerja yang kecil dengan jumlah warga yang sedikit pula. Ini memudahkan pengelolaan wilayah seperti permukiman, infrastruktur, ekosistem daratan dan lautan. Ini juga mempermudah penanganan penduduk, baik dalam aspek kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial antar warga. Meskipun dalam wilayah yang kecil, posisi desa sebagai bagian dari birokrasi nasional, posisi masyarakat sebagai bagian kewarganegaraan Indonesia, dan ekosistemnya sebagai bagian ekosistem lebih luas, maka substansi pembangunan di desa juga kompleks.

Pada posisi inilah SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa. Yaitu membangun desa dengan isi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang keberhasilan penerapan SDGs pada satu desa, pada masing- masing desa, menjadi maksimal. Ini berita gembira bagi upaya implementasi SDGs di lapangan.



SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa mencakup seluruh aspek pelokalan yang sudah pernah dilakukan. Seluruh tujuan dalam SDGs yang telah diindonesiakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selanjutnya dilokalkan ke level desa dalam SDGs Desa. Penggunaan bahasa penting: menjadi harus sederhana, merujuk pada pernyataan tujuan, dan rasional untuk dipenuhi (jika pembangunan dijalankan). SDGs Desa bukan pemikiran abstrak, melainkan kongkrit untuk dijalankan di lapangan. Ini ditunjukkan oleh mudahnya pengambilan data lapangan. Kemudian, berbasis data tersebut, terbitlah rekomendasi perbaikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi rekomendasi berujud kegiatan-kegiatan pembangunan, yang melibatkan warga desa, sehingga menjadi bukti bahwa SDGs Desa adalah konsep praktis.

A Halim Iskandar (2020), Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

Keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs Desa terangkum dalam Sistem Informasi Desa (SID) pada laman <https://kemendes.go.id/sid/>. Inilah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.

SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya kreasi desa yang terumuskan dalam musyawarah desa masing-masing. SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan: 1. Desa tanpa kemiskinan; 2. Desa tanpa kelaparan; 3. Desa sehat dan sejahtera; 4. pendidikan Desa berkualitas; 5. keterlibatan perempuan Desa; 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan; 8. pertumbuhan ekonomi Desa merata; 9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 10. Desa tanpa kesenjangan; 11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; 12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 13. Desa tanggap perubahan iklim; 14. Desa peduli lingkungan laut; 15. Desa peduli lingkungan darat; 16. Desa damai berkeadilan; 17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan 18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa (SID). Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. 7 PEMUTAKHIRAN DATA BERBASIS SDGS DESA Pemutakhiran IDM 2021 juga

berbasis SDGs Desa. Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga. Pihak yang Terlibat Pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa ialah Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21/2020, Pokja Relawan Pendataan Desa ini mencakup: 1. Pembina : Kepala Desa 2. Ketua : Sekretaris Desa 3. Sekretaris: Kasi Pemerintahan Desa 4. Anggota : a. Unsur Perangkat Desa b. Ketua RW c. Ketua RT d. Unsur Karang Taruna e. Unsur PKK f. Unsur masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan pendata 4. Mitra : a. Pendamping Desa b. Babinsa c. Babinkamtibmas d. Mahasiswa yang berada di Desa Peran Kepala Desa Pemimpin yang disegani serta memiliki wewenang besar di desa ialah kepala desa. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa, untuk membawa desanya lebih maju.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: 1. Pendataan Desa; 2. Perencanaan Pembangunan Desa; 3. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan 4. pertanggungjawaban Pembangunan Desa. Pendataan SDGs Desa dilaksanakan sebagai sensus partisipatoris dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Partisipasi di antara Pokja Pendataan Desa, pemerintah desa, dan warga desa sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Seluruh data dijaga kerahasiaannya.

Seluruh data dapat langsung digunakan untuk keperluan beragam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mustafa, M., & Afrianto, D. (2022). Problematika Pendampingan Program Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2021 di Provinsi Riau. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 38-59.

Ramadana, C. B. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

# **BAB 4**

## **EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka pembangunan desa sebaiknya diselenggarakan secara bersamaan dengan pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat dijadikan satu tolak ukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa guna menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. agar pembangunan di tahap pemerintahan desa dapat terlaksana secara terintegrasi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa adalah peran yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. UMKM desa adalah bisnis yang dikelola oleh individu atau kelompok kecil pedesaan, yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan dan perdagangan. UMKM desa umumnya memiliki skala usaha yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan di kota. perusahaan kota seringkali dikelola dengan sumber daya terbatas. meskipun demikian, usaha tersebut bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal karena jumlahnya yang besar dan penyebarannya di berbagai desa. UMKM desa seringkali terkait erat dengan lingkungan dan sumber daya alam disekitarnya. UMKM desa berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan

sosial di masyarakat setempat. penduduk desa menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM desa juga memperkuat ikatan sosial dan kehidupan komunitas di desa melalui kolaborasi dan saling ketergantungan antara para pelaku usaha.

## **METODE**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang dimaksud metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif penulis dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu, sehingga merupakan suatu studi komperatif. (Nazir,1988 : 63-64).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti mengambil salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu Survey yang mana studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Pemerintah Desa**

Desa di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain yang beda budayanya. Beberapa para ahli pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. "Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain".

Menurut Strong (Syafie, 2002:12) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar.

Menurut Syafie (2003:136) menyatakan pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Widjaja (1999:19) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan menurut Cotler dalam Sinambela (2006:4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara dalam Sinambela (2006:5) berpendapat Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata dan cara yang telah ditetapkan.

## **B. Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sektor ekonomi yang berfokus pada kegiatan yang menghasilkan nilai tambah melalui kreatifitas, inovasi, dan ekspresi budaya. ini mencakup berbagai industri yang terkait dengan kreasi, produksi, dan distribusi karya-karya budaya dan kreatif. ekonomi kreatif didorong oleh individu-individu yang memiliki bakat, keterampilan, dan keahlian kreatif yang menghasilkan produk dan layanan yang unik, orisinal, dan menghibur, yang pada gilirannya menciptakan nilai ekonomi. salah satu ciri khas ekonomi kreatif adalah penggabungan antara elemen ekonomi dan budaya. produk



dan layanan yang dihasilkan dalam sektor ini sering kali mencerminkan identitas budaya dan memiliki nilai estetika yang tinggi. ekonomi kreatif juga berperan penting dalam mempertahankan, menghidupkan, dan mendorong perkembangan budaya lokal dan warisan budaya yang unik. Di desa saguling ekonomi kreatif mengalami beberapa tantangan utama termasuk kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta, pembiayaan, akses pasar, dan keberlanjutan. penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi industri kreatif agar dapat tumbuh dan berkembang.

### **C. Sarana dan Prasarana**

Prasarana dan prasarana kantor desa 1, puskesmas pembantu 1. Untuk sarana pendidikan perpustakaan desa 1, gedung sekolah paud 8, gedung sekolah TK 1, gedung sekolah SD 2, gedung sekolah SMA 1. Untuk sarana ibadah mesjid 36 dan mushola 5 buah. Prasarana transportasi jalan desa aspal/beton 8 km, jalan kabupaten aspal/beton 6 km, jembatan besi 7 buah. Prasarana air bersih pengolahan air bersih 1, mata air 7, sumur gali 1.220, tangki air bersih 1. Prasarana irigasi dan sanitasi jamban keluarga 1.225, pintu air 5, saluran irigasi 12.000 m. Kelembagaan desa saguling TP PKK dengan jumlah pengurus 7 orang dan jumlah ruanglingkup 12 jenis, Bumdes jumlah pengurus 3 orang. Untuk keamanan dan ketertiban jumlah anggota linmas/hansip 37 orang dan pos kamling 39 buah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor yang semakin berkembang di Indonesia. Di Desa Saguling, terdapat sejumlah

masyarakat yang telah berhasil mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang makanan tradisional. dalam hal ini akan menjelaskan tentang potensi dan keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif UMKM makanan tradisional oleh masyarakat Desa Saguling.

1. Deskripsi Potensi Makanan Tradisional Desa Saguling:

- a. Varietas makanan tradisional yang khas dengan cita rasa unik dari Desa Saguling.
- b. Keberagaman bahan baku lokal yang digunakan untuk makanan tradisional tersebut.
- c. Nilai budaya dan warisan lokal yang terkandung dalam makanan tradisional Desa Saguling.

2. Inisiatif Masyarakat dalam Mengembangkan Makanan Tradisional:

- a. Pelatihan dan pendampingan dari pihak terkait dalam mengembangkan keterampilan kuliner dan manajemen bisnis.
- b. Kolaborasi antara masyarakat Desa Saguling dengan para ahli kuliner untuk menciptakan inovasi dalam makanan tradisional.
- c. Pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran dan promosi produk.

3. Dampak Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM Makanan Tradisional di Desa Saguling:

- a. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Saguling.

- b. Pelestarian warisan budaya lokal melalui pengembangan makanan tradisional.
  - c. Meningkatnya kunjungan wisatawan yang tertarik dengan kuliner khas Desa Saguling.
4. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan UMKM Makanan Tradisional:
- a. Tantangan dalam sertifikasi dan pengemasan makanan tradisional untuk memenuhi standar keamanan pangan.
  - b. Keberlanjutan produksi dan pasokan bahan baku lokal.
  - c. Peningkatan kualitas manajemen bisnis dan kemampuan pemasaran.
5. Rekomendasi dan Pemikiran untuk Pengembangan Masa Depan:
- a. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif UMKM makanan tradisional.
  - b. Pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung seperti peningkatan akses pasar, fasilitas produksi, dan pelatihan keterampilan.
  - c. Inovasi dalam produk dan promosi untuk menggaet lebih banyak pasar lokal maupun internasional. Pengembangan ekonomi kreatif UMKM makanan tradisional di Desa Saguling memberikan potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat,

pelestarian budaya lokal, dan pariwisata. Namun, tantangan dan upaya kolaboratif perlu terus dilakukan untuk menjaga keberhasilan dan berlanjutnya pengembangan UMKM makanan tradisional di masa depan.

Produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa saguling adalah :

1. ketupat dan keripik singkong

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan ekonomi lokal. Pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan pangsa pasar yang besar seperti warung-warung dan pasar juga sangat membantu dalam meningkatkan omzet penjualan produk tersebut. dalam wawancara, produksi ketupat dan keripik yang terjual mencapai sebanyak 500 buah per hari dengan harga jual Rp 1.000 per satuannya. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan tradisional seperti ketupat dan keripik singkong masih memiliki banyak peminat di masyarakat meskipun terdapat makanan modern yang lebih mudah ditemukan dan memiliki rasa yang berbeda. Dalam aspek pemasaran, pihak pengelola usaha telah memanfaatkan sarana tradisional seperti pasar dan warung sebagai jalur distribusi utama. Namun, mungkin perlu di adakan pengembangan pasar yang lebih luas dan lebih strategis untuk memperluas pangsa pasar seperti pasar online dan eksportir. Dalam aspek produksi, proses pembuatan ketupat dan keripik singkong memakan waktu yang cukup lama (sekitar 4 jam untuk mengukus ketupat) sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi agar dapat menyelesaikan

pesanan dengan waktu yang lebih cepat dan menjaga kualitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan mesin-mesin yang membantu proses produksi agar dapat lebih cepat dan efisien. Secara keseluruhan, pengembangan produk ekonomi kreatif makanan tradisional seperti ketupat dan keripik singkong dapat menjanjikan dalam meningkatkan ekonomi lokal apabila dilakukan dengan baik dan efektif dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam aspek produksi dan pemasaran.

## 2. Domplu (Apem)

Dalam produksi makanan tradisional domplu (apem), penggunaan bahan-bahan fermentasi dan proses perebusan atau pemanggangan merupakan langkah-langkah penting dalam memperoleh cita rasa yang khas. Dalam aspek pemasaran, makanan tradisional demplu (apem) dari Desa Saguling dijual melalui warung-warung terdekat dan pasar-pasar setempat. Selain itu, telah terjalin kerja sama dengan toko-toko makanan tradisional untuk menjadi tempat penjualan dan promosi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan upaya yang baik dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk makanan tradisional tersebut. Kerja sama dengan toko-toko makanan tradisional juga dapat menjadi peluang untuk melakukan promosi dan branding produk domplu (apem). Misalnya, melalui kemasan produk yang menarik dan label yang menginformasikan keunikan dan keaslian makanan tradisional tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan daya tarik produk dan memperluas jangkauan konsumen. potensi dan

peluang pengembangan produk makanan tradisional domplu (apem) dari Desa Saguling. Melalui upaya pemasaran, produksi, dan promosi yang tepat, produk ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi lokal serta memperkenalkan keunikan makanan tradisional Indonesia pada masyarakat.

### 3. Kremes

produksi kremes dari ubi dapat menjadi sarana potensial dalam meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Saguling. Dalam wawancara dengan Pak Rudy, salah satu pengusaha makanan ringan yang terlibat dalam produksi kremes, beliau menyatakan bahwa salah satu peran penting dari pihak desa adalah mengangkat dan mengekspos potensi-potensi yang ada di Desa tersebut melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Dalam hal ini, Desa Saguling melalui kerja sama dengan pengusaha makanan ringan seperti Pak Rudy dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Produksi kremes dari ubi menjadi sumber penghasilan yang dapat dihasilkan di dalam kampung. Selain itu, produksi kremes juga membantu mempromosikan keunikan dan kekayaan kuliner dari Desa Saguling. Penting untuk dijaga kualitas produk kremes dan juga peningkatan kapasitas produksi dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Pihak desa dapat membantu mengarahkan pengusaha lokal untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pengembangan pasar melalui pelatihan dan pemberian bantuan untuk peralatan produksi dan pengemasan. Dalam mengangkat potensi ekonomi

kreatif di Desa Saguling, pihak desa juga dapat mempromosikan produk-produk lokal melalui internet, atau aplikasi online untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini dapat membantu produk kremes dari ubi menjadi populer dan meningkatkan omzet penjualan. produksi kremes dari ubi dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat Desa Saguling serta membantu mengangkat potensi ekonomi kreatif di desa tersebut. Kerja sama dengan pihak swasta dan peningkatan kualitas dan kapasitas produksi menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi produk tersebut. dalam melakukan produksi ekonomi kreatif tradisional secara manual dilakukan oleh sumber daya manusia dari mulai pengepakan tahap pengemasan. pak Rudy juga tidak hanya mengangkat 2 bidang ekonomi kreatif tapi beliau juga mengangkat hutan desa atau memberi pisioner kepada pemerintah seperti RT dan RW sehingga warga dapat termotivasi. jadi pak Rudy memiliki 1 pabrik kremes, tetapi beliau memasarkan 30 jenis makanan khas Ciamis, yang dimana makanan tersebut di ambil dari usaha rumahan untuk mendorong pemasaran dan mengangkat ekonomi warga.

#### 4. Fashion Rumahan

Fashion rumahan merupakan salah satu ekonomi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, namun pelaksanaannya belum mendapat banyak dukungan dari para pihak terkait, kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi kreatif yang terkoordinasi,

efektif dan efisien agar ekonomi kreatif rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan salah satunya dengan pemberdayaan fashion rumahan di desa saguling memberdayakan fashion rumahan oleh ibu-ibu PKK, pemerintah desa saguling memanfaatkan event seni budaya untuk mempromosikan dan mempopulerkan fashion rumahan tersebut sehingga bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas. selain itu, dengan mempopulerkan produk fashion rumahan ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. dengan demikian, usaha masyarakat pedesaan dalam bidang fashion rumahan bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. di desa saguling fashion rumahan belum cukup optimal dalam usahanya. dalam wawancara dengan salah satu ibu PKK yang ada di desa saguling mengatakan dalam mengidentifikasi bahwa bisnis fashion rumahan di desa saguling belum memiliki cukup dana untuk menginvestasikan dalam mesin atau peralatan yang diperlukan untuk produksi atau manufaktur. keterbatasan kemampuan bisnis untuk memproduksi pakaian dengan skala yang lebih besar atau meningkatkan efisiensi proses edukasi. selain itu hanya ada satu pegawai yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan pemasaran.



## **KESIMPULAN**

Pembangunan desa di desa saguling dalam meningkatkan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah desa saguling. ekonomi kreatif yang ada di desa saguling memanfaatkan potensi kreatif dan sumber daya yang ada disekitar.melalui pemberdayaan, masyarakat desa saguling diberdayakan dengan pengetahuan, keterampilan dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha kreatif dan memanfaatkan hasil alam yang ada. serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa saguling lebih menonjol ke ekonomi kreatif makanan dan fashion kekinian.kemunculan berbagai produk kuliner yang inovatif dan kreatif menjadi salah satu bukti dari perkembangan ekonomi kreatif di lingkungan desa saguling. dalam hal ini, pengembangan usaha kuliner dapat menjadi sebuah pilihan tepat untuk menggerakkan ekonomi di desa. selain sebagai sumber penghasilan, pengembangan usaha kuliner yang khas dan unik ini dapat mengembangkan kreativitas dan potensi masyarakat desa lebih lanjut. diantaranya dengan memasarkan produk secara profesional, membentuk komunitas pakar kuliner dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layang Untuk Semua. 2020. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. (diakses 22 Desember 2022).

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layang Untuk Semua. 2020. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-8/>. (diakses 22 Desember 2022).

Panduan Desa Damai Berkeadilan Diharapkan Membuat Desa Mampu Mandiri. 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1402981/panduan-desa-damai-berkeadilan-diharapkan-membuat-desa-mampu-mandiri>. (diakses 22 Desember 2022).

Panduan Desa Damai Berkeadilan Diharapkan Membuat Desa Mampu Mandiri. 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1402981/panduan-desa-damai-berkeadilan-diharapkan-membuat-desa-mampu-mandiri>. (diakses 22 Desember 2022).

Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. 2021. <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/1/sdgs-11-kawasan-permukiman-desa-aman-dan-nyaman>. (diakses 22 Desember 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

# **BAB 5**

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI DESA PUSAKANAGARA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan kontribusi warga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup partisipasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional dan melibatkan masyarakat. Dalam masyarakat harus tumbuh kesadaran akan eksistensinya, karena masyarakat mempunyai peran dalam keberhasilan perencanaan pembangunan bersama pemerintah. Ditahap awal proses pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan pedoman penting bagi terlaksananya kegiatan pembangunan itu sendiri. Sehingga perencanaan pembangunan hendaknya dapat bersifat aplikatif dan dapat diimplementasikan. Selain itu perencanaan yang dibuat hendaknya tidak terlalu mengatur dan mampu menyentuh segala aspek kehidupan di masyarakat, serta mampu mengikuti tuntunan perubahan disekitarnya secara nyata.

Salah satu bukti adanya Pembangunan di Desa yaitu berjalannya program PTSL-PM. Dimana dalam program ini partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting guna terlaksananya tujuan dari program PTSL-PM tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan partisi masyarakat dalam program pemerintah masih dirasakan kurang, termasuk

dalam program PTSL-PM di Desa Pusakanagara. Yang dimana pada awal pelaksanaan masyarakatnya kurang tertarik terhadap program PSLM-PM yang diadakan oleh pemerintah. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa program pemerintah terdahulu yang dirasa oleh Masyarakat bahwa program tersebut tidak berkelanjutan.

Desa Pusakanagara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Desa Pusakanagara memiliki potensi di beberapa bidang salah satunya yaitu di bidang pengolahan pangan, berupa pengolahan makan ringan keripik pisang. Keripik pisang tersebut menjadi produk unggulan UMKM di Desa Pusakanagara. Desa Pusakanagara memiliki luas wilayah 289,82 Ha dengan jumlah penduduk 3.040 jiwa yang terdiri dari 1.560 laki-laki dan 1.480 perempuan. Desa Pusakanagara terbagi atas dua dusun yaitu Dusun Lawang dan Dusun Karang Kendal.

Kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, sementara luas tanah yang tersedia di mukabumi cenderung tidak bertambah (Badoa, dkk. 2018). Meningkatnya permintaan akan tanah mengakibatkan terjadinya persaingan akan kepemilikan tanah, sehingga setiap individu berupaya mengamankan hak atas tanahnya. Dalam situasi seperti itu program sertifikasi tanah secara massal adalah solusi yang tepat. Program sertifikasi tanah secara massal dapat meningkatkan investasi dan dimasa mendatang akan didapat nilai manfaatnya jauh di atas biaya pelaksanaan sertifikasi (Deininger, Ali and Alemu 2009). Pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar isi pasal tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa terhadap program PTSL-PM dan mengetahui bagaimana partisipasi Masyarakat di dalamnya.

Hasil penelitian yaitu bahwa Partisipasi masyarakat yang dilakukan di pemerintahan desa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Pusakanagara belum berjalan dengan baik, yang dilihat dari aspek kesiapan pihak desa dalam mengajukan target sertifikat hak atas tanah mengalami keterlambatan, dalam persyaratan yang akan diajukan tidak terpenuhi, dapat terlihat dari E-KTP yang tidak valid. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu diketahui adanya perbedaan dan persamaan dengan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : persamaannya terkait dengan implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain itu kesamaan lainnya yaitu melalui analisis data kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian peneliti terdahulu menggunakan teori menurut Van Metter & Van Horn dalam (Agustino 2020 : 150-153) yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan peneliti menggunakan teori George C. Edward III dalam Agustino ( 2016:136-141) yaitu dengan variabel - variabel yang

mengukur keberhasilan suatu program yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

### **Pengertian Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### **Pengertian PTSL**

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

### **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode kualitatif tersebut, penulis terjun langsung ke lapangan dalam rangka meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan Pemerintah Desa Pusakanagara. Adapun dalam pengumpulan datanya penulis mewawancarai tokoh

yang memegang pendataan PTSL Desa yang berada di Desa Pusakanagara dengan tujuan penarikan kesimpulan.

Margono (2013:39) menyatakan bahwa :

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2016:9) menyatakan bahwa :

Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, penaskahan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun, termasuk pemberian suatu tanda bukti haknya bagi bidang bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta 21 hak-hak tertentu yang membebaninya. (Peraturan Pemerintah

Nomor 24/1997) dalam Waskito, Arnowo (2016: 106) mengemukakan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, dinyatakan bahwa :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan penaskahan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Dalam pendaftaran tanah ada azas yang harus dilaksanakan dalam mendaftarkan tanah ini, adapun azas mengenai pendaftaran tanah yaitu sebagai berikut :

- a. Sederhana dan aman : dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah harus dilakukan secara teliti dan cermat.



- b. Terjangkau : keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.
- c. Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.
- d. Terbuka : masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Jadi, dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Dokumen-dokumen tersebut dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan diberikan sistem pengamanan tertentu secara elektronik di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.

Namun perlu diingat bahwa terdapat faktor yang sangat penting dan utama dalam berjalannya berbagai program pemerintah khususnya dalam program PTSL-PM ini, yakni adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan tanah termasuk masyarakat itu sendiri sehingga terjadi sinergitas dari berbagai pihak yang tentunya bisa mengakselerasi proses pendaftaran tanah. Membangun keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan agar terwujud kesadaran diri masyarakat untuk terlibat aktif terhadap program pemerintah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masyarakat memiliki kepentingan kuat dalam menjaga kepemilikan tanahnya, utamanya dalam menjaga azas *contradicture delimitasi* dalam hal penetapan

batas bidang tanah yang bersebelahan sesuai kesepakatan dengan pemilik bidang tanah serta dalam mewujudkan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria.

Partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik tanah diharapkan menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan PTSL, masyarakat dianggap memainkan peran sentral dalam proses pembangunan. Adapun partisipasi masyarakat di Desa Pusakanagara dalam program PTSL-PM, pada saat awal diadakannya program tersebut masih banyak masyarakat yang kurang percaya, dibuktikan dengan adanya masyarakat yang menolak namun ada juga yang menerima program tersebut. Dari total 1.200 kuota yang tersedia hanya 400 kuota yang terisi, bagi masyarakat yang berantusias dengan adanya program PTSL-PM mereka segera mendaftar dan mengumpulkan persyaratan ke pantia pelaksana program ataupun menyerahkan langsung ke kantor Desa Pusakanagara. Jika dari kuota 1.200 hanya 400 yang menerima program artinya hanya 33% masyarakat yang antusias terhadap program PTSL-PM. Setelah program PTSL-PM berjalan dengan baik partisipasi masyarakat mulai meningkat. Dibuktikan dengan bertambahnya bidang tanah yang didaftarkan yaitu menjadi 900 bidang tanah yang telah terdaftar. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menyadari pada saat pengukuran di lapangan melihat program PTSL-PM berjalan dengan baik, sehingga banyak warga yang menjadi berikut serta jika bidang tanahnya diukur.

Selain itu partisipasi lainnya dibuktikan dengan dibentuknya pokmas. Kelompok masyarakat ini dibentuk untuk membatu

tugas pemerintah desa dan puldatan dalam melaksanakan PTSL. Penunjukan pokmas berdasarkan rapat yang dihadiri oleh pemerintah desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Kepala Dusun, Karang Taruna dan semua masyarakat dengan menunjuk beberapa masyarakat yang berkeinginan dalam membantu jalannya pelaksanaan PTSL di tiap dusun. Tugas pokmas dalam percepatan PTSL dengan aplikasi Survey Tanahku di Desa Pusakanagara yaitu memberikan informasi berkas, mengumpulkan persyaratan-persyaratan berkas PTSL dari masyarakat seperti KTP, KK, surat keterangan tanah, PBB, dan lain sebagainya, melengkapi kekurangan berkas yang belum dilengkapi oleh masyarakat yang belum paham karena faktor usia dan faktor ketidaktahuan, membuat peta kerja dan mencocokkan nama yang ada di peta kerja dengan KTP peserta PTSL, mencocokkan nama yang ada di peta dengan KTP dan KK, dan melaporkan hasil ke puldatan.

Menurut Harsono (2008: 474) dalam pasal 1 mengemukakan bahwa : “Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961.”

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

## **KESIMPULAN**

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg dimulai dari kegiatan sosialisasi, pengumpulan data hingga pada penyerahan sertipikat tanah kepada pemegang hak milik berjalan dengan lancar, dan tepat sasaran. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Pusakanagara telah sesuai yang diharapkan hal ini terlihat dari kelengkapan berkas yang diajukan masyarakat sebanyak 1.300 berkas, yang secara berkala dilakukan pengecekan mulai dari pemberkasan dalam pendaftaran sampai terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Program PTSL ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta untuk mengurangi terjadi sengketa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angi, Syahrani. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara* 07, No.02. ( 2019 ): 8879-8891
- Harfianty, M., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2020). Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. *Tunas Agraria*, 3(3).
- Rani Rahayu. 2022. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis. Universitas Galuh Ciamis.

Saputro, K. (2021). *Partisipasi masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung kidul)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

# BAB 6

## PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAJADI

---

---

### PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah program dunia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan alam. Fokus utama SDGs terdiri dari 18 tujuan berkelanjutan dengan 169 capaian yang terukur yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia yang mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata Kelola (Idowu et.al,2020, United Nations, 2017).

Menanggapi banyaknya permasalahan disetiap pemerintahan desa. maka strategi pembangunan SDGs yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi dan memberikan perhatian besar terhadap pembangunan dan kemajuan suatu desa.

Pembangunan desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan desa pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada mencapai tujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang menjamin keadilan.

## **METODE**

Pada metode kualitatif yang dilakukan pada saat melakukan penelitian, dalam hal ini umumnya kami menggunakan metode observasi (dengan dijelaskannya apa yang telah diobservasi dan hasil observasi yang ingin didapat) dan wawancara (metode ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber).

Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan. Program SDGs memberikan pengaruh baik dalam perkembangan untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan masyarakat desa. Indikator unggulan pencapaian program SDGs di Desa Sukajadi, yaitu:

### **A. Penerapan program Desa Peduli Pendidikan**

Lingkungan, Sakola Motekar atau biasa disebut PNF (Sekolah Non Formal) sebagai salah satu indikator dari potensi yang dimiliki Desa Sukajadi. Sakola Motekar (Modal, Tekad, Kadaek, Rampak) biasa dipergunakan sebagai media kreatif untuk



menyampaikan aspirasi hingga menyampaikan suatu keresahan warga, agar warga setempat bisa kompak dan bersama melalui medium berkumpul atau ngariung.

Manusia secara kodrati diberikan berbagai kebutuhan. Sehingga A. Maslow (D. Sudjana, 2003) menyebutkan bahwa kebutuhan pertama manusia selalu menyangkut kebutuhan fisiologis. Dengan demikian, berdirinya program Sakola Motekar akan memberikan nilai positif bagi masyarakat Semua unsur yang berada dalam pelaksanaan keberhasilan SDGs di Desa Sukajadi memberikan motivasi kuat keseluruh aspek masyarakat agar dapat memberikan kontribusi Bersama bagi keberlangsungan dan keberhasilan antara program desa, program masyarakat dengan program SDGs.

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam membantu pencapaian program pendidikan dalam mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah. Desa Sukajadi dalam program Desa Peduli Pendidikan mempunyai satu indikator penting dalam proses pemberian edukasi pembelajaran bagi masyarakat setempat, yakni dibangunnya Sekolah Yayasan Sakola Motekar dengan berlandaskan kesadaran juga keperluan masyarakat akan pentingnya memperoleh pendidikan dari usia dini hingga jenjang dewasa.

Desa Sukajadi memiliki tujuan dalam pembentukan dan pembangunan program Desa Peduli Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi penduduk masyarakat dengan adanya pembanguan gedung sekolah serta kegiatan bimbingan belajar gratis yang disediakan bagi anak-anak warga Desa Sukajadi.

Oleh karena itu pendidik di Yayasan Sakola Motekar dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, pengajar yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar

yang efektif dan akan lebih mampu mengelola pengembangan anak didik, sehingga hasil belajar anak didik berada pada tingkat yang optimal. Pengelolaan dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran yang mendasar, diantara sekian macam tugas pendidik di dalam proses pembelajaran.

Pengajar dibutuhkan untuk membimbing, memberi bekal sesuatu yang berguna bagi siswa, sehingga mampu memberikan motivasi di dalam proses interaksi dengan siswa. Khusus dalam masalah ini akan dibahas mengenai keaktifan. Dengan keaktifan siswa dapat merasakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.

### **1. Kegiatan Pemberdayaan di Lingkungan Sekolah Moterkar**

Proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berfikir rasional, kreatifitas dan kritis pada anak didik. Agar dapat berfikir kreatif maka anak-anak harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sebab dengan adanya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran akan tercipta situasi belajar aktif.

Pada akhirnya pengajar menggunakan metode belajar yang tepat diharapkan akan dapat meningkatkan keaktifan belajar meningkatkan nilai belajar siswa. Dengan demikian pengajar perlu melakukan upaya peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran lebih efektif dengan menggunakan metode yang tepat. Perlu adanya tindakan yang tepat adalah dengan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang tepat. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode bermain peran.

Metode bermain merupakan metode yang komunikatif karena dapat meningkatkan minat siswa untuk mempraktekan atau memerankan tokoh atau orang lain menimbulkan rasa empati kepada orang lain. Metode bermain dapat melibatkan anak-anak aktif secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode bermain peran diharapkan proses pembelajaran pada anak-anak akan lebih meningkat sehingga nilai yang diperoleh anak-anak menjadi lebih baik.

## **B. Strategi Pemberdayaan dalam kegiatan Sakola Motekar**

Masa anak-anak adalah sebagian dari kehidupannya secara keseluruhan. Fisik, mental, dan kesehatan, sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis (spiritual) lainnya. Membangkitkan motivasi intrinsik (motivasi dari dalam diri) anak akan menghasilkan inisiatif sendiri (self directed activity) yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Orang-orang sekitar (anak dan orang dewasa) dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Pada haikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan.

## **C. Konsep Bermain Sebagai Metode Pembelajaran Anak Usia Dini**

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosioemosional. Belajar melalui bermain atau seraya belajar.

Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui permainan, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. Lingkungan yang kondusif dan menantang. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan, sekaligus menantang dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.

#### **D. Peranan Keluarga terhadap Pendidikan Anak Usia**

Keluarga merupakan lembaga sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Melalui keluarga anak belajar berbagai hal agar kelak dapat melakukan penyesuaian diri dengan budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Orang tua memegang peran penting dalam proses sosialisasi yang dijalani seorang anak.

Selain keluarga, anak mulai mengenal teman sebaya, media, sekolah, komunitas, sistem hukum, dan sistem keyakinan. Pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama hendaknya dapat berperan seoptimal mungkin agar anak memiliki nilai-nilai keutamaan sebagai pedoman dalam berperilaku.

#### **E. Macam-Macam Bermain dan Manfaatnya**

Menurut Hughes seorang ahli perkembangan anak seperti dikutip oleh Imam Musbikin (2010: 98) paling tidak ada lima unsur dalam suatu kegiatan yang disebut bermain. Pertama, tujuan bermain. Tujuan bermain adalah permainan itu sendiri dan si pelaku mendapat kepuasan karena melakukannya (tanpa target), bukan untuk misalnya mendapatkan uang. Kedua, dipilih secara bebas. Permainan dipilih sendiri, dilakukan atas kehendak sendiri, dan tidak ada yang menyuruh

ataupun memaksa. Ketiga, menyenangkan dan dinikmati. Keempat, ada unsur khayalan dalam kegiatannya. Kelima, dilakukan secara aktif dan sadar. Bermain bagi anak-anak sangat memberikan manfaat bagi mereka. Anak akan mengenal berbagai jenis permainan dan masing-masing permainan ini memiliki manfaat yang berbeda-beda, sehingga kejiwaan mereka akan semakin berkembang.

Manfaat bermain ialah bertujuan untuk memperkuat fisik (tubuh) lewat gerakan-gerakan otot. Lewat berbagai permainan itu, otot-otot mereka tumbuh dan berkembang secara wajar. Dengan bermain juga dapat meningkatkan komunikasi, semakin mendekatkan hubungan antara anak dengan teman-temannya, orang tua, dan gurunya, melatih bermasyarakat.

#### **F. Metode Pembelajaran Bagi Anak Usia Dini**

1. Bercerita, bercerita adalah menceritakan atau membacakan cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan.
2. Bernyanyi, bernyanyi adalah kegiatan dalam melagukan pesan-pesan yang mengandung unsur pendidikan.
3. Berdarmawisata secara langsung ke obyek-obyek yang sesuai dengan bahan kegiatan yang sedang dibahas di lingkungan kehidupan anak.
4. Bermain Peran, bermain peran adalah permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, dan peran-peran tertentu sekitar anak. bermain peran merupakan kegiatan menirukan perbuatan orang lain di sekitarnya.

Dengan menggunakan strategi, metode/bahan dan media yang menarik, permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi (penjajakan), menemukan, dan memanfaatkan berbeda-beda di sekitarnya. Konsep bermain inilah yang kemudian disebutnya sebagai belajar sambil bermain.

Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain, anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indra-indra tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali, dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri. Dengan bermain, anak-anak menemukan dan mempelajari hal-hal atau keahlian baru dan belajar (learn) kapan harus menggunakan keahlian tersebut, serta memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya (need).

Melalui bermain peran, anak-anak mencoba mengeksplorasi hubungan antar manusia dengan cara memperagakannya dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-sama dapat mengeksplorasi perasaan, sikap, nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Sebagai suatu model pembelajaran, bermain peran berakar pada dimensi pribadi dan sosial.

## **KESIMPULAN**

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. SDGs berupaya mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan program pemberdayaan masyarakat desa akan tercapai sesuai dengan rencana yaitu kemandirian masyarakat. Faktor yang menunjang pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa diperlukan seorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat yang berlandaskan agama maupun organisasi masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan, inisiatif, kreatifitas dan produktivitas masyarakat desa. Dimana semua program mendapatkan hasil sesuai dengan rencana dan tujuannya, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal terhadap kesejahteraan di Desa Sukajadi yang berdampak positif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137-139.
- Boekoesoe, L., & Maksum, T. S. (2022). Optimalisasi Pembangunan.
- Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 11(1), 209-218.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sustiawan, A. (2022). *efektivitas program sdgs desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa ngabar ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN).

Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.



# **BAB 7**

## **PEMANFAATAN POTENSI DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA UTAMA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin sering kali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan

kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran memiliki peluang cukup besar untuk dipecahkan.

Pemberdayaan menurut Mardikanto dan Subiato (2019:27) yaitu: Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang pemanfaatan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemerintah desa yang

dilakukan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang, dengan rincian ; Kepala Desa 1 orang, Perangkat Desa 2 orang, Perangkat keamanan desa 1 orang, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Langkah-langkah analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verifikasi).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menurut Mas'ood (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah 'Upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat'.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Imran (2008:30) konsep keberdayaan pada dasarnya adalah: Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional..

### **Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004:80) adalah: Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami

oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah - masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil pelayanan (service outcome) sebelum pelayanan di konsumsi.

### **1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta);
- d. Pengembangan usaha produktif;
- e. Penyediaan informasi tepatguna.

### **2. Potensi Desa**

Potensi adalah segala sesuatu yang dimiliki tetapi belum dimanfaatkan. Selama belum dimanfaatkan maka potensi suatu wilayah tidak akan memberikan apapun bagi masyarakat, Menurut Bintarto, potensi desa dibagi dalam dua kelompok yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan alam di suatu wilayah (desa). Yang termasuk dalam potensi fisik antara lain: iklim, air, tanah, perkebunan, hutan, laut, dan lain sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**

Pembahasan tentang Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, ini didasari oleh dimensi dari indikator strategi pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- a. Pengembangan sumberdaya manusia;
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok;
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepatguna

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Utama, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sebagai berikut:

#### **a) Pengembangan Sumberdaya Manusia**

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia, pemerintah desa utama mengupayakan untuk melakukan pembekalan ilmu terhadap para petani, peternak sapi, dan juga petani ikan, dengan cara sosialisasi dan pelatihan, juga pemerintah Desa utama memberikan bantuan terhadap Masyarakat yang ingin mengembangkan potensi yang berada di sekitar nya, seperti

pembibitan ikan mujair, karena sebagian besar masyarakat di Desa utama memiliki kolam ikan sendiri yang terletak di halaman rumah nya, maka pemerintah Desa berinisiatif untuk membantu dengan memberikan bibit ikan Mujair dengan regulasi yang di aatur oleh pemerintah Desa.

#### b) Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok, pemerintah Desa utama menggandeng beberapa kelompok diantaranya kelompok peternak sapi, kelompok petani, dan juga kelompok petani ikan agar dapat membantu pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat desa, dengan melakukan sosialisasi dan juga memberikan bantuan berupa bibit pangan dan hewani agar dapat dikelola oleh kelompok yang bersangkutan dengan regulasi yang di atur oleh pemerintahan Desa utama

#### c) Pemupukan Modal Masyarakat (swasta)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemupukan Modal Masyarakat, Pemerintah Desa Utama yang memiliki ambisi untuk menjadikan Desa Utama terkenal sebagai penghasil ikan Mujair, dengan potensi Desa yang cukup besar di karenakan sebagian masyarakat memiliki kolam ikan di rumahnya masing-masing, oleh karena itu pemerintah Desa utama memberikan bantuan berupa ikan Mujair terhadap Masyarakat yang memiliki kolam di rumahnya untuk dapat dikembang biakan, juga pemerintah desa utama memiliki rencana dalam hal ketahan pangan dan hewani dengan berternak sapi dengan cara melakukan kerjasama dengan kelompok peternak dan juga orang kaya untuk bekerjasama dalam menjalankan peternakan sapi dan juga pemerintah Desa utama memberikan modal bibit sapi untuk di kembang biakan

#### d) Pengembangan Usaha Produktif

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Pengembangan Usaha Produktif, Untuk di Desa Utama sendiri masih belum optimal, hal ini ditandai karena sebagian besar masyarakat di Desa Utama lebih menekuni profesi menjadi Petani. Adapun pengembangan usaha di bidang ikan mujair pemerintah desa utama melakukan kerjasama dengan beberapa rumah makan di desa utama, agar dapat membeli ikan mujair kepada masyarakat sekitar.

#### e) Penyediaan Informasi Tepat-Guna

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Penyediaan Informasi Tepat-Guna, Pemerintah Desa Utama memberikan sosialisasi kepada setiap masyarakat mengenai perkembangan harga pasar, juga Pemerintah Desa Utama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar menjadi wadah bagi para pelaku usaha apabila menemukan kesulitan atau hambatan dalam usahanya,

## **2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan, juga kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga asset yang sudah di berikan oleh pemerintah desa, kurangnya tanggung jawab masyarakat dalam memelihara potensi desa yang ada seperti

wisata kampung paniisan, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aset desa yang dititipkan adalah untuk di berdayakan bukab semata-mata pemberian hibah dari pemerintah desa, keterbatasan keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa untuk dialokasikan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat,, keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya serta SDM dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih kurang, masih adanya masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes.

Pemberdayaan menurut Mas'oeed (1990) dalam Mardikanto dan Soebianto (2017:26) adalah 'Upaya memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat'. Menurut Imran (2008:30) konsep keberdayaan pada dasarnya adalah: Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun intenasional. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan teori-teori bahwa sebuah pemberdayaan adalah upaya memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat, menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional.



### **3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Timbul Berkaitan Dengan Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis diantaranya yaitu merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa meminta bantuan kepada dinas terkait yang ahli dalam bidang pariwisata, perikanan, pertanian, perekonomian, dan juga peternakan untuk menjadi narasumber dalam pelatihan tersebut, memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam profesi yang ditekuninya, pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang terkait agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan pengelolaan yang baik dan benar, mengalokasikan dana desa ke Bumdes sesuai aturan yang berlaku, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk bisa digunakan sebagai potensi yang harus dikembangkan, memberikan pemahaman mengenai persaingan usaha yang baik dan tidak merugikan orang lain, menjangring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk ikut bergabung menjadi anggota Bumdes serta memberikan pemahaman mengenai Bumdes adalah mitra desa dan bisa

dijadikan wadah bagi masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang ekonomi

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004:80) adalah: Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat di desa utama kecamatan cijeungjing kab ciamis sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan analisa 5 (lima) strategi program pemberdayaan menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebianto (2015:170), dalam pemanfaatan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemilihan jenis usaha, pengelolaan SDM, dan juga pengembangan karir pengembangan jejaring kemitraan, manajemen logistik, finansial, pengembangan sarana dan prasarana dapat dikatakan cukup baik.

Hambatan-hambatan yang dialami mengenai Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul mengenai Pemanfaatan Potensi Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

## **DAFTAR PUSTAKA**

Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat. Jakarta:Kencana

Solekhan,Moch. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Moleong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<https://sg.docworkspace.com/l/sIG608seRAbHEjqUG?sa=00&st=0t>

<https://tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli-gbyu>

<https://sg.docworkspace.com/l/sIOa08seRAeuDlqUG?sa=00&st=1t>

# **BAB 8**

## **PERAN KADER POSYANDU TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut Sulistiyani (2009) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Secara bahasa arti pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan yang membuat berdaya yaitu dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Posyandu berfokus pada kesehatan ibu dan anak, dengan menyediakan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan, kesehatan, dan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006: h.11). Dalam program posyandu ada

yang namanya peran kader posyandu, kader posyandu merupakan anggota masyarakat yang secara sukarela memilih terlibat dalam kegiatan posyandu tersebut dengan tujuan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Menurut (Dr. Soemanto Setioso) bahwa kader posyandu memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Yang bertindak sebagai pendamping masyarakat dalam menjaga kesehatan dan memberikan dukungan dalam hal pelayanan kesehatan, dan menjadi perubahan sosial bagi masyarakat.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006: h.2). Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Lembaga ini diatur untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 371 ayat (2) bahwasanya desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Pemimpin pemerintah desa, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1), adalah kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis merupakan desa pamekaran dari Desa Saguling pada

bulan Januari tahun 1985. Sejak berdiri 37 tahun silam Desa Mekarjaya terus menerus melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembangunan baik dalam bidang fisik maupun nonfisik terutama dalam bidang kesehatan. Desa Mekarjaya terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu dusun mekarsari, dusun balemonyang, dan dusun pasir data yang mencakup 7 Rw dan Rt 28. berdasarkan data SDGs jumlah penduduk dengan jumlah Kepala Keluarga 1,314 KK dengan total keseluruhan penduduk sebanyak 3,817 jiwa. Dengan hal ini pemerintah Desa Mekarjaya dalam mengoptimalkan program posyandu maupun posyandu balita ataupun posyandu lansia di lingkungan Desa Mekarjaya sangatlah penting, dengan itu peran kader posyandu sangatlah penting bagi kemajuan program Posyandu. peran kader Posyandu dalam pemberdayaan masyarakat sangat vital. Kader Posyandu berperan sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat terutama posyandu. Dengan adanya kader Posyandu, upaya pemberdayaan masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena vitalnya peran kader Posyandu,

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Adisasmito (2007: h.191) posyandu merupakan jenis UKBM yang paling memasyarakat dewasa ini. Posyandu yang meliputi lima program prioritas yaitu: Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare, terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka kematian bayi.

Menurut Dr. Riris, kader Posyandu berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Mereka

memiliki tanggung jawab dalam mengorganisir, memfasilitasi, dan memotivasi masyarakat untuk aktif dalam program Posyandu. Kader juga berperan dalam mendukung program-program lain seperti keluarga berencana, pengendalian penyakit menular, dan perbaikan gizi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kader Kesehatan pada pasal 1 ayat (4) yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang selanjutnya di sebut kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif di dasarkan pada data kualitatif. Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan yang berlaku pada orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif di diharapkan menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sugiyono,2006). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, tersebut di dapatkan dari data ilmiah seperti Google Scholar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kader Posyandu dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Peran kader posyandu adalah menciptakan kondisi agar masyarakat dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, keluarga, dan masyarakat sekitar. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat maka kader berperan aktif untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup, dan juga kader memberikan motivasi, contoh sehingga dapat menjalankan program untuk meningkatkan kesehatan, kader posyandu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program posyandu. Program yang dikembangkan untuk meningkatkan kesehatan antara lain pendamping TB, screening TB, pemeriksaan stunting, pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Meskipun Posyandu sangat diperlukan dan penting peranannya bagi pemerintah, namun kenyataannya secara nasional hanya 27,3% rumah tangga yang telah memanfaatkannya. Sebanyak 62,5% rumah tangga tidak membutuhkan, dan 10,2% rumah tangga tidak menggunakan fasilitas Posyandu untuk alasan lainnya.

Posyandu secara spesifik cukup kompleks, kader memberikan bantuan kepada bidan desa, perawat desa, atau pihak penyelenggara kesehatan lainnya. Pada posyandu anak kader membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan ibu dan anak. Sedangkan posyandu orang lanjut usia (Lansia) kader membantu pihak penyelenggara kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Dalam pelaksanaan Posyandu meliputi pendataan Bayi di bawah Usia Lima Tahun (Balita), penimbangan dan pencatatan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pendistribusian vitamin, melakukan



penyuluhan gizi dan kesehatan kepada kelompok sasaran, serta melakukan kunjungan ke rumah ibu menyusui dan ibu Balita, serta memberikan pelayanan kepada Lansia.

### **Kinerja Peran Kader Posyandu dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Partisipasi sebagai kader Posyandu dilatarbelakangi faktor internal dan eksternal. Faktor internal menjadi kader Posyandu yaitu jiwa sosial tinggi untuk membantu orang lain di bidang kesehatan dan keinginan untuk mendapat pengetahuan tentang kesehatan, terutama anak dan ibu hamil. Faktor eksternal yang melatarbelakangi adalah ingin membantu program pemerintah untuk membentuk anak sehat dan mempunyai layanan kesehatan keluarga yang mudah dijangkau. Kesadaran untuk terlibat aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mengambil bagian dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama anak-anak. Faktor yang mempengaruhi kinerja kader Posyandu sangat kompleks dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Selain faktor internal seperti usia, lama dedikasi, pengalaman, status sosial, keadaan ekonomi, dan dukungan keluarga; faktor eksternal seperti kondisi masyarakat dan instansi kesehatan juga mempengaruhi motivasi dan retensi kader Posyandu.

Kader juga memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dalam layanan kesehatan mandiri yaitu sebagai bukti pertolongan pertama dan pengobatan sendiri jika terjadi diare, penyuluhan gizi, penyuluhan penyakit wabah, mengajak partisipasi aktif orang tua melalui kunjungan ke rumah, serta kelas ibu hamil dan balita. Kader Posyandu mampu memberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan untuk mencegah demam berdarah, campak, dan penyakit kaki

gajah. Kader dapat memberikan pengertian tentang kejadian ikutan pasca imunisasi kepada orang tua balita

### **Hasil Kegiatan Observasi oleh Kader Posyandu sebagai bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu kegiatannya adalah penyuluhan yang dilakukan kader Posyandu yakni penyuluhan stunting. Pendekatan program pelayanan difokuskan pada program terpadu (Integrated program) melalui pemberdayaan masyarakat pada lansia dan peran serta aktif masyarakat dengan memprioritaskan upaya promosi (pemeliharaan) dan preventif (pencegahan) kesehatan lansia. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini adalah mengadakan posyandu lanjut usia setiap bulan sekali (setiap hari sabtu). Kegiatan posyandu tersebut baru sebatas: penyuluhan, pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, pengobatan sederhana dan pemberian makanan tambahan, sehingga belum semua kegiatan posyandu dapat dilakukan semua seperti pemeriksaan status gizi, senam lansia, pemeriksaan status mental dan pemeriksaan fisik.

Dalam penelitian ini, bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu kader posyandu yang berada di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Posyandu didaerah ini bernama posyandu Anggrek, kader posyandu Anggrek beranggotakan 5 (lima) orang dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kegiatan posyandu mawar dilaksanakan satu bulan sekali yang diikuti oleh 23 bayi dan balita.

Selain kegiatan penimbangan, pemberian imunisasi dan pemberian obat cacing posyandu mawar juga membuka kelas ibu hamil, kelas ibu balita, membuka program KB untuk pasangan usia subur, promosi kesehatan serta berkerjasama dengan desa dalam melaksanakan program stunting dengan

memberikan makanan tambahan, susu dan vitamin kepada balita stunting dan ibu hamil.

Adapun pembagian tugas setiap kader sebagai berikut :

1. Kader 1 : Bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan pendaftaran yang meliputi pendaftaran balita, ibu hamil (Bumil), ibu nifas, ibu menyusui dan sasaran lainnya.
2. Kader 2 : Berfungsi sebagai tempat penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkaran kepala anak, deteksi perkembangan anak, pemantauan status imunisasi anak, pemantauan yang berkaitan dengan permasalahan balita.
3. Kader 3 : Bertugas sebagai pengisian KMS atau buku KAI serta mencatat kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada hari posyandu.
4. Kader 4 : Bertugas dalam menyampaikan penyuluhan serta kader dapat melakukan konseling, atau diskusi kelompok dan demonstrasi (praktek) dengan orang tua atau keluarga balita.
5. Kader 5 : Membantu Ibu Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

### **Hambatan Peran Kader Posyandu**

Beberapa hambatan pelaksanaan posyandu yang ditemui adalah masyarakat tidak paham urgensi pemantauan tumbuh kembang balita dan tidak mengetahui peran keberadaan posyandu. Kader sebagai bagian dari masyarakat berperan ganda dalam meningkatkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaan tugas, hambatan luar atau eksternal yang dihadapi kader Posyandu adalah saat

pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat, akses jalan yang mereka lalui buruk. Transportasi dan finansial juga dapat menjadi penghambat. Keterbatasan transportasi dapat menghambat mobilisasi kader pada waktu bertugas, seperti keperluan mobilisasi pada saat kunjungan rumah, dll. Keterbatasan finansial dapat pula mempengaruhi pelaksanaan dan penyelenggaraan program kesehatan. Hambatan eksternal lainnya yang dapat terjadi yakni terkait dengan karakter dan sikap masing-masing orang dalam menanggapi dan menerima informasi kesehatan dan peranan kita sebagai kader kesehatan. Hambatan lain yang berasal dari kader itu sendiri (hambatan internal) yakni dimana pengetahuan kader yang kurang tentang pelaksanaan Posyandu dan terkait informasi-informasi kesehatan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kader tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan Posyandu dan pelatihan lainnya yang menunjang peran kader dalam menjalankan tugasnya

## **KESIMPULAN**

Kader Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui edukasi, pemantauan kesehatan, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat, mereka membantu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengambil tindakan positif terhadap kesehatan mereka sendiri dan anggota keluarga. Dengan demikian, peran kader Posyandu secara signifikan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan. Peran aktif kader posyandu terbukti mampu memaksimalkan kontribusi serta partisipasi masyarakat dalam serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu.

Dengan adanya peran kader ini dapat membantu pemberdayaan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang *Kader Kesehatan*

Fadhly, Zuhrizal, and Rahmayana Rahmayana. "PERAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM POSYANDU." *Jurnal Public Policy* 4.2 (2018): 206-216.

Ilyas, Azizah Nurul Karohmah. "Peran Posyandu Lansia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 2.2 (2017).

Kusuma, Cendani, et al. "Literature Review: Peran Kader Posyandu Terhadap Pemberdayaan Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional SEXOPHONE (Sex Education, Health Policy, and Nutrition)*. 2021.

Septia, Annisa Intan, et al. "POSYANDU SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT." *Prosiding Seminar Kesehatan Nasional Sexophone*. 2021.

Suhroh, Lailatus, and Galih Wahyu Pradana. "Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan." *Publika* (2021): 93-104.

# **BAB 9**

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UMKM DAN PEMBANGUNAN DESA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat merupakan dua hal yang saling terkait dan sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki potensi besar dalam besar dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menjadi pedoman utama dalam upaya mencapai kesejahteraan dan berkelanjutan di tingkat global.

Pada posisi inilah SDGs dibutuhkan untuk diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Yaitu membangun desa dengan subrtansi yang total, namun dapat dikendalikan pada wilayah dan warga yang terbatas. Artinya, peluang Pelokalan SDGs pada masing-masing desa menjadi maksimal. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa: 4 “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 membuka ruang yang sangat besar kepada desa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri kemudian mendapatkan dana untuk mewujudkan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka dari berbagai aspek. Apabila ditinjau dari aspek kewilayahan dan aspek kewenangan maka desa berpotensi menjadi penentu tercapainya target SDGs pada tahun 2030 di Indonesia.

SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Jadi SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Tujuannya sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing memiliki target sendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya adalah sebanyak 169. Pengertian SDGs (Sustainable Development Goals) dan 17 Tujuannya SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. Implementasi SDGs di tingkat desa sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara holistic dan terintegrasi.

SDGs juga dikenal sebagai Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Tujuan SDGs dikembangkan untuk menggantikan Millennium Development

Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, kerangka kerja SDGs tidak membedakan antara negara-negara “maju” dan “berkembang”. Sebaliknya, tujuannya berlaku untuk semua negara.

Pembangunan desa yang berkelanjutan dan pemerdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam pencapaian SDGs. Dalam konteks pembangunan desa, pemerdayaan masyarakat berarti memberikan kesempatan, sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat desa dapat memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, serta memperoleh manfaat langsung dari pembangunan yang berlangsung.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada SDGs memberikan peluang dan tantangan yang kompleks. Dalam satu sisi, terdapat potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya lokal, membangun kapasitas masyarakat, dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Di sisi lain, ada tantangan dalam mengatasi kesenjangan sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta menghadapi perubahan iklim dan kerentanan lingkungan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat penting untuk melakukan praktikum yang melibatkan pengamatan dan penelitian langsung di lapangan. Dengan kami sebagai mahasiswa terjun langsung ke lapangan kami akan mengetahui mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk memajukan wilayah Desa



Tanjungsari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pembangunan Desa**

Menurut Sanusi Bachrawi (2004 : 59) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya yang nyata yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

### **2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

### **3. Pengertian UMKM**

Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan

usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## **METODE**

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan datanya peneliti mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Penelitian ini dilakukan di desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada mata kuliah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDGs, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktikum di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Dimana dalam praktikum ini

kami memahami berbagai hal penting dalam pembangunan desa, seperti partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, dan akses terhadap pelayanan dasar, kami juga bekerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sector swasta.

UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi adalah biang kuliner. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Meskipun sedang pemulihan pasca pandemi, para wirausaha tidak kehabisan akal. Makanan-

makanan yang biasa dijual di pinggir jalan kini bisa dialihkan menjadi makanan berupa frozen food atau makanan kering.

Selanjutnya beberapa kegiatan kelompok kami selama menjalankan observasi. Di hari pertama kelompok kami melakukan wawancara singkat bersama bapak Maman Supriatman S.Pd selaku Kepala Desa di DesaTanjungsari, berikut pembahasan yang kami lakukan ialah pengenalan desa dan memberikan surat izin praktikum di Desa Tanjungsari lalu mewawancarai Kepala Desa seputar Profil Desa, keadaan desa Tanjungsari dan potensi yang dimiliki oleh desa Tanjungsari. Kami juga berdiskusi mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs yang ada di Desa Tanjungsari. Pada hari kedua kami melakukan diskusi bersama Kepala Desa dan juga dihadiri oleh Mahasiswa Universitas Siliwangi untuk berdiskusi mengenai kekurangan atau kendala yang berbasis SDGs. Karena hal tersebut bisa menjadi bahan untuk kami mengimplementasikan apa yang masih menjadi kekurangan di Desa Tanjungsari. Setelah kami berdiskusi dengan perangkat desa tanjungsari ternyata masih terdapat jalan yang masih rusak dan kami langsung terjun ke lapangan untuk menyurvei beberapa jalan dan melakukan pengukuran jalan yang akan dibangun. Dan selanjutnya masih ada beberapa jalan yang masih rusak, jalan yang rusak ini tepatnya tidak jauh dari kantor desa. Di desa tanjungsari juga terdapat kerajinan kadang ayam yang terbuat dari bambu. Kerajinan ini di buat asli dari tangan-tangan kreatif masyarakat di desa tanjungsari. Selain membuat kerajinan kandang ayam, disini juga ada beberapa kerajinan lain nya seperti kandang ayam petelur full bambu, kandang ayam petelur, alas bambu bawha besi, ayam petelur (pulet), pakan ayam petelur, dan terakhir bambu glondongan. Selanjutnya kami mengunjungi salah satu pemilik UMKM keripik kaca dimana kami melihat serta membantu cara

pembuatan keripik kaca dan sedikit mewawancarai pemilik dari UMKM tersebut. Ini adalah salah satu bahan dasar pengolahan kripik kaca. Bahan ini berbahan dasar singkong yang di parut, lalu air parutan singkong tersebut yang menjadi bahan dasar kripik kaca ini. Air parutan singkong tersebut diolah kembali hingga menjadi adonan kripik. Kami juga mengunjungi salah satu objek wisata di Desa Tanjungsari, salah satunya leuwi pamipiran, dimana leuwi pamipiran ini di Kelola oleh desa Tanjungsari, namun setelah kami berkenjeng kesana dan bertemu dengan salah satu masyarakat yang mengelola objek wisata tersebut, beliau menyebutkan bahwa perkembangan leuwi pamipiran hingga saat ini sudah di kenal oleh banyak orang tidak ada campur tangan dari pihak desa. Pemasukan dan pengeluaran untuk objek wiasata tersebut didapatkan dari uang parkir dan uang masuk.

Berikut kegiatan kelompok kami selama beberapa hari melakukan praktikum di Desa Tanjungsari. Melihat dari partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, dan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam praktek ini kami lebih menitik beratkan pada SDGs poin 9 yaitu insfratuktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Dalam SDGs pada tujuan poin 9 mendorong inovasi, meningkatkan industri, inklusif dan berkelanjutan, serta membangun insfrastruktur yang tangguh. Hal ini membuktikan bahwa inovasi, industri, menjadi faktor SDGs yang harus mendapat perhatian lebih demi terwujudnya tujuan itu sendiri.

Berikut kami sertakan gambar mengenai data SDGs poin 9 mengenai insfrastruktur dan inovasi desa berkelanjutan di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1	Jalan kondisi baik mencapai 100%	35.61	219	Km
2	Dermaga atau tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%	N/A	0	Dermaga
3	Industri mencemari udara mencapai 0%	N/A	0	RT

**Gambar 1. Data Lapangan**

Setelah kami melihat data SDGs desa dan kenyataan di lapangan memang benar adanya mengenai infrastruktur yang ada di Desa Tanjungsari, yaitu masih terdapat jalan, drainase, dan gorong-gorong yang rusak, masih terdapat sarana prasarana Pendidikan yang belum memadai, posyandu yang belum memadai.

Setelah kami mengobservasi dan mewawancari perangkat desa mengenai infrastruktur yang telah di laksanakan dan sedang dilasanakan dilaksanakan salah satunya yaitu Pembangunan TPT Cikalagen RT 6 sebesar 430x0,3x0,6 m, Rabat Gang Cikalagen RT 04 sebesar 153x1x0,05 m, pembangunan jalan usaha tani Bobojong sebesar 323x1x0,1 m, renov gorong-gorong Cikalagen RT 04 sebesar 12x1x1,5 m, pembangunan saluran irigasi Cukang Uncal RT 2 sebesar 164x0,3x0,5 m dan lanjutan pembangunan kantor desa.

Dengan demikian, beberapa kendala Desa Tanjungsari yang harus dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya permodalan usaha, karena belum adanya pihak ketiga untuk penambahan modal usaha.
2. Akses jaringan internet yang belum merata dan terbatas membuat akses internet menjadi sulit.
3. Masih ada sekolah yang belum layak untuk dijadikan sarana pembelajaran, karena fasilitas yang belum mendukung.
4. Sarana dan prasarana jalan, drainase, gorong-gorong masih banyak yang rusak

## **KESIMPULAN**

Pada mata kuliah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDGs, kami mendapatkan Pada mata kuliah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDGs, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktikum di Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Dimana dalam parktikum ini kami memahami berbagai hal penting dalam pembangunan desa, seperti partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, dan akses terhadap pelayanan dasar, kami juga bekerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sector swasta.

Lalu ada beberapa hambatan atau kendala yang kita dapatkan selama melakukan observasi ialah kurangnya permodalan usaha, karena belum adanya pihak ketiga untuk penambahan

modal usaha lalu akses jaringan internet yang belum merata dan terbatas membuat akses internet menjadi sulit. Selanjutnya masih ada sekolah yang belum layak untuk dijadikan sarana pembelajaran, karena fasilitas yang belum mendukung. Dan dari hasil observasi kami masih ada sebagian warga yang masih menggunakan jamban, Sarana dan prasarana jalan, drainase, gorong-gorong masih banyak yang rusak.

Pemasukan dan pengeluaran untuk objek wisata tersebut didapatkan dari uang parkir dan uang masuk. Namun kami lebih menitik beratkan pada SDGs poin 9 yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Dalam SDGs pada tujuan poin 9 mendorong inovasi, meningkatkan industri, inklusif dan berkelanjutan, serta membangun infrastruktur yang tangguh. Hal ini membuktikan bahwa inovasi, industri, menjadi faktor SDGs yang harus mendapat perhatian lebih demi terwujudnya tujuan itu sendiri. Setelah kami mengobservasi dan mewawancari perangkat desa mengenai infrastruktur yang telah di laksanakan dan sedang dikasikan baik dilihat dari segi fisik maupun non fisik yaitu dari segi infrastruktur fisik Pembangunan TPT Cikalagen, Rabat gang Cikalagen, dan lanjutan Pembangunan kantor desa



## **DAFTAR PUSTAKA**

Nurhayati, (2017). “Pengabdian Masyarakat Luar Negeri Pendampingan Guru Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sustainable Development Goals”

Rahmadhani, Suci (2022).” Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulukabupaten Kampar”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tanjungsari-Ciamis.desa.id. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023, dari <https://tanjungsari-ciamis.desa.id/>

# BAB 10

## PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

---

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang saling terkait dan sangat penting. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi pedoman utama dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan di tingkat global. *SDGs* sebagai serangkaian tujuan dan target yang diadopsi oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dunia saat ini. *SDGs* mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, penanggulangan perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan. Implementasi *SDGs* di tingkat desa sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara holistik dan terintegrasi. Pembangunan desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam pencapaian *SDGs*. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kesempatan,

sumber daya, dan keterlibatan aktif kepada masyarakat desa dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa dapat memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, serta memperoleh manfaat langsung dari pembangunan yang berlangsung. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada SDGs memberikan peluang dan tantangan yang kompleks. Dalam satu sisi, terdapat potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya lokal, membangun kapasitas masyarakat, dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Di sisi lain, ada tantangan dalam mengatasi kesenjangan sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta menghadapi perubahan iklim dan kerentanan lingkungan. Untuk melaksanakan praktek ini Pemerintahan Desa yang difasilitasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh dengan sasaran desa di wilayah Kabupaten Ciamis tepatnya di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 : Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Pembangunan Desa**

Menurut (Sutoro, 2015), pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, upaya pembangunan desa adalah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip dasar yang saling berkesinambungan meliputi Prinsip Kebutuhan, Prinsip Partisipasi, Prinsip Keterpaduan, Prinsip Berkelanjutan, Prinsip Keserasian, Prinsip Kemampuan Sendiri, Prinsip Kaderisasi (Supriyatna, 2000 dalam Nain, 2019; 32-34).

## **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014

butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Widjaja (2011) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawakesejahteraan bagi desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu: 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberipenyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ; 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan; 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.

## **4. Sustainable Development Goals (SDGs)**

### **Pengertian SDGs Desa**

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa pedulilingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramahperempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunanberkelanjutan.

### **SDGs Desa**

Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan Desaberkualitas
5. Desa berkesejahteraangender
6. Desa layak air bersih dansanitasi
7. Desa yang berenergibersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi
9. Inovasi dan infrastrukturdesa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan desa berkelanjutan pemukiman
12. Konsumsi dan produksidesa yang sadar lingkungan

13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. *Ekosistem laut desa (khusus untuk desa yang ada di wilayah pesisir pantai)*
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemirnaan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Desain pelaksanaan atau tahapan dalam kegiatan praktek matakuliah Sistem Pemerintahan Desa ini adalah sebagai berikut: (1) observasi pendahuluan, (2) identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) pelaksanaan praktek mata kuliah dengan mitra dari pemerintahan desa yang sudah ditetapkan, (4) penyusunan laporan kegiatan praktek mata kuliah dan artikel ilmiah. Data yang kami dapatkan dalam praktek mata kuliah ini terdiri dari dua jenis data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari sumberreferensi lain atau hasil dokumentasi baik dari data profil desa, hasil kajian atau penelitian dan atau artikel, serta sumber lainnya yang tidak terkait secara langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Letak Geografis Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Secara geografis ketinggian Desa Karanganyar dari permukaan laut yaitu 145 MDPL, koordinat - 7.305886° LS, 108.420667° BT dengan suhu maksimal/minimum 32°C/26°C. Memiliki luas wilayah 703,035 Ha terbagi menjadi 5 (lima) Dusun, 16 (enam belas) RW dan 35 (tiga puluh lima) RT. Adapun jumlah penduduk Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis berjumlah 2.547 jiwa, dengan rincian sebagai berikut, laki-laki berjumlah 1.253 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.294 jiwa.

### **1. Keadaan Penduduk Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis sangat beragam mulai dari karyawan, wiraswasta, buruh tani, pertanian, perternakan, dan perdagangan. Tetapi mayoritas masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pendidikan, di Desa Karanganyar sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain: Sekolah Play Group sebanyak 2 buah : Sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 2 buah ; SD (Sekolah Dasar) ada 2 buah : SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 1. Sedangkan jumlah sarana atau tempat ibadah yang ada di Desa Karanganyar ada 9 (sembilan) masjid dan 29 (dua puluh sembilan) mushola/langgar/surau.



## **2. Program Pemberdayaan Desa Karanganyar**

Program Pemberdayaan Desa Karanganyar adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa Karanganyar. Program ini didesain untuk mendorong partisipasi aktif warga desa dalam merumuskan dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Berikut ini adalah beberapa program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Karanganyar yaitu ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan potensi Desa dianggap hal yang sangat penting oleh Pemerintah Desa Karanganyar dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan desa karanganyar, peran masyarakat akan memastikan bahwa program tersebut relevan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki dukungan yang kuat.

## **4. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDGS**

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis SDGs (Sustainable Development Goals) adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan target-target yang terdapat dalam SDGs ke dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di tingkat desa, sesuai dengan agenda global yang tercantum dalam SDGs.

## Tipe Desa sesuai SDGS Desa peduli Kesehatan

Penyediaan akses layanan kesehatan yang merata: Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua penduduk di desa memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan dasar. Desa Karanganyar sendiri layanan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik yaitu semua penduduk di Desa Karanganyar memiliki akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Serta Pembangunan Desa termasuk dengan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan memperkuat tenaga kesehatan lokal. Seperti pembangunan posyandu, penyuluhan dan pelatihan kader, penyelenggaraan posyandu yang mana sumber anggaran dana tersebut bersumber dari ADD, DDS dan PBP. Jumlah prasarana dan sarana kesehatan Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis antara lain, Puskesmas Pembantu 1 dan balai kesehatan ibu dan anak 1. Sedangkan sarana kesehatan antara lain, dukun bersalin terlatih 1, bidan 2, perawat 4, dukun pengobatan alternatif 1. Tipe Desa sesuai SDGS Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan , SDGs Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan SDGs tersebut di tingkat desa. Tujuan ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di desa-desa dengan memperkuat akses terhadap sumber daya, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Keberadaan UMKM di desa dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Desa Karanganyar Sendiri sudah mempunyai UMKM yaitu Fitri Jaya Lestari berupa kerajinan dari tempurung kelapa dan kayu aren. Tujuannya yaitu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan. Serta ketahanan pangan hewani yaitu budidaya ikan nila di kelompok tani

Bandasalam Dusun Bandaruka Desa Karanganyar. Tipe desa sesuai SDGS Desa Ekonomi Tumbuh Merata, SDGs Desa Ekonomi Tumbuh Merata adalah salah satu tujuan dari program SDGs Desa. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang tumbuh merata secara ekonomi dengan memperhatikan pemerataan hasil pembangunan. Desa Karanganyar sendiri sudah melaksanakan peningkatan kualitas infrastruktur di desa, seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi. Akan tetapi ada beberapa yang belum terlaksana. Yang mana sumber anggaran dana tersebut bersumber dari ADD. Tipe desa sesuai SDGS Desa Peduli Lingkungan Dengan adanya bank sampah dan KWT (Kelompok Wanita Tani) merupakan langkah yang baik dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan cara yang berkelanjutan. Dengan adanya bank sampah dan KWT di setiap dusun, Desa Karanganyar dapat mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan sampah, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, sampah yang terkumpul kemudian dapat dijual atau diproses menjadi barang bernilai ekonomi seperti barang daur ulang. Selain itu, keberadaan bank sampah dan KWT juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan memberdayakan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian berkelanjutan termasuk SDGS ramah perempuan. Tipe desa sesuai SDGS Desa Peduli Pendidikan. SDGs Desa Peduli Pendidikan bertujuan untuk menciptakan desa yang peduli pendidikan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di desa. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, diharapkan warga desa dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan

yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kemiskinan.

Pada bidang pendidikan, di Desa Karanganyar sudah cukup baik. Desa tersebut ditunjang dengan sarana pendidikan antara lain, Sekolah Play Group, Sekolah Taman Kanak-kanak, SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama). Serta perpustakaan desa yang aktif di Kecamatan Cijeungjing adalah Perpustakaan Pelita Hati Desa Karanganyar. Perpustakaan ini dinobatkan sebagai perpustakaan terbaik di Kabupaten Ciamis tahun 2021 dan mengikuti lomba perpustakaan desa tingkat Provinsi Jawa Barat dengan meraih juara ke-4. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, Paud, TK, TPQ/Madrasah non/formal milik desa, anggaran tersebut yang bersumber dari dana ADD dan DDS. Tipe desa sesuai SDGS Desa Berjejaring, SDGs Desa Berjejaring adalah salah satu tujuan dari program SDGs Desa. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang berjejaring dengan membangun kemitraan dan kerjasama antara desa dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tipe desa sesuai SDGS Desa Tanggap Budaya, SDGs Desa Tanggap Budaya adalah salah satu tujuan dari program SDGs Desa. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang tanggap budaya dengan memperhatikan keberagaman budaya dan adat istiadat di desa. Upaya pelestarian seni tradisional pencak silat paguyuban tri budaya mekar di Desa Karanganyar melalui program SDGS Desa Tanggap Budaya dapat memberikan dampak positif dalam mempertahankan identitas budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata budaya.

## 5. Strategi dan Hambatan yang dihadapi Desa Karanganyar

- a) Hambatan : Keterbatasan Sumber Daya Finansial, salah satu hambatan utama dalam pembangunan desa di Desa Karanganyar adalah keterbatasan dana yang tersedia.
- b) Strategi : Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan.
- c) Hambatan : Keterampilan dan Pengetahuan, Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan. Jika masyarakat tidak memiliki keterampilan yang cukup atau pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, atau usaha mikro, maka pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat.
- d) Strategi : Melakukan pelatihan dan pendidikan reguler kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang-bidang yang relevan, seperti pertanian, manajemen usaha, atau keahlian khusus lainnya. Serta memberikan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan..
- e) Hambatan : Rendahnya Partisipasi Masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan sangat penting. Jika masyarakat kurang terlibat

dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, maka program tersebut mungkin tidak mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dampaknya akan lebih rendah.

- f) Strategi : Rendahnya Partisipasi Masyarakat, membangun mekanisme partisipasi yang efektif, seperti forum masyarakat atau kelompok diskusi, untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Mengadakan kampanye sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Strategi-strategi ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan cara yang lebih mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dan mendukung upaya pemberdayaan desa.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya terlihat bahwa desa tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur menjadi dasar untuk pembangunan desa yang berkelanjutan.

Program pemberdayaan desa di Desa Karanganyar, seperti ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas kader kesehatan

masyarakat, telah dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan sektor ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan pembangunan desa.

Desa Karanganyar juga telah mengadopsi pendekatan berbasis SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti peduli kesehatan, tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, peduli lingkungan, peduli pendidikan, berjejaring, dan tanggap budaya.

Meskipun telah ada upaya yang positif, Desa Karanganyar juga menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya finansial, keterampilan, pengetahuan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi seperti pengelolaan dana yang efisien, pelatihan dan pendidikan masyarakat, serta membangun mekanisme partisipasi aktif dapat diimplementasikan.

Secara keseluruhan, Desa Karanganyar telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan potensi desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dukungan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan Desa Karanganyar dapat terus maju menuju tujuan pembangunan desa yang lebih baik di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

- Kushandajani. 2016. *Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. E-Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan UNDIP, Vol 2, No. 1, Maret 2016.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sutoro E, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Tentang Desa.
- Theresia A, NTP, M.Si dkk. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Umar Nain. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Edisi 1, Garis Khatulistiwa. Makassar 90222
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa Profil Desa Karanganyar Tahun 2023



# **BAB 11**

## **PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PEMASARAN**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Desa Sukamaju merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Baregbeg , Kabupaten Ciamis . Lokasi desa yang strategis menjadikan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Pada sektor pertanian, Desa Sukamaju mempunyai komoditas seperti jagung , cabai, Mentimun , dan Tomat . Pada sektor peternakan, peternak Desa Sukamaju mempunyai komoditas peternakan sapi dan susu perah. Banyaknya komoditas pertanian dan peternakan di Desa Sukamaju tidak dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan warga tentang teknologi informasi dan pemasaran. Dari sisi informasi, hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat luas tentang hasil pertanian dan peternakan Desa Sukamaju . Dari sisi pemasaran, hal ini menyebabkan penjualan hasil pertanian dan peternakan masih dilakukan secara mulut kemulut atau pemasaran offline . Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi menjadi sesuatu yang penting dan menjadi salah satu penunjang kebutuhan dan kehidupan manusia. Teknologi informasi saat ini sudah banyak merambat menjadi medium yang digunakan orang untuk melakukan kegiatan seperti transaksi, komunikasi, diskusi, maupun sebagai wadah penyedia informasi. Dengan bantuan Teknologi Informasi, penyampaian informasi dan kegiatan pemasaran lebih mudah

dilakukan, tanpa terbatas waktu ataupun tempat. Kegiatan penyampaian informasi dan pemasaran dengan bantuan teknologi informasi dapat menghemat biaya dan waktu dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan jangkauan informasi dan jangkauan pasar Desa Sukamaju , dibutuhkan teknologi implementasi agar dapat menjangkau kegiatan pasar dan informasi tentang Desa Sukamaju yang lebih luas. Pada permasalahan tersebut, ditawarkan solusi dengan penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi yang diusulkan oleh tim pengabdian masyarakat adalah website, e-commerce, dan media sosial. Penerapan dan implementasi teknologi yang penulis usulkan adalah penggunaan website sebagai media informasi dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan Desa Sukamaju.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Sulistiyo-Basuki, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, serta menyebarkan informasi . Informasi yang dimaksud pada hal ini berupa :

1. Numerik, yaitu informasi berupa angka.
2. Audio, yaitu informasi berupa suara atau sesuatu yang bisa terdengar.
3. Teks, yaitu informasi berupa tulisan atau sesuatu yang terbaca.
4. Citra, yaitu informasi berupa gambar atau citra bergerak.

Menurut Fauziah & Hedwig (2010: 4) teknologi (technology) adalah pengetahuan tata cara pemakaian jenis-jenis perangkat

teknik baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah sehingga peralatan teknik yang digunakan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Menurut Munir (2009: 29) teknologi pada hakikatnya adalah alat untuk memberi nilai tambah dan menghasilkan produk yang bermanfaat.

Sedangkan menurut Kadir (2003: 13). Teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemrosesan data yaitu menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan mengumpulkan data.

Menurut Ginanjar (2014) Web disusun dari halaman – halaman yang menggunakan teknologi web dan saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa website adalah rangkaian atau sejumlah halaman web di internet yang memiliki topik saling berkaitan untuk mempresentasikan suatu informasi

Menurut Suharto (2012) Web dan internet merupakan dua hal yang berbeda. Internet lebih merupakan perangkat keras dan web merupakan perangkat lunak. Protokol yang digunakan internet dan web berbeda, internet menggunakan TCP/IP sebagai protocol sedangkan web menggunakan HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Menurut Suharto (2005:60), Pemberdayaan dapat dimaknai dengan sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah proses pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperkuat kelompok yang lemah dalam masyarakat terutama individu yang mengalami masalah kemiskinan.

2. Sebagai tujuan pemberdayaan adalah keadaan yang ingin dicapai dengan sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan dan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik, ekonomi dan sosial seperti rasa percaya diri, menyampaikan ide atau pemikiran, mempunyai pekerjaan, berperan dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **METODE**

Jenis metode yang digunakan dalam observasi ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang digunakan dengan kata-kata. Menurut *Bogdan dan Taylor*, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2013: 04).

Sementara itu, observasi Menurut Sugiyono (2018:229) yang mana observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk observasi. Oleh karena itu, maka Penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Jl. Sukamaju No.59 Telp 085302650254. Penelitian ini dilakukan pada tanggal Juni sampai tanggal 30 Juni 2023. Menurut Lofland dan lofland (dalam Moleong, 2013: 157) "Sumber data utama dalam metode kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Sumber data

akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

Hasil Observasi wilayah dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi Pengabdian Masyarakat yang bertempat di Desa Sukamaju . Setelah terjun kelapangan, didapatkan potensi Desa Sukamaju berupa potensi pertanian dan peternakan.

Dilakukan dengan cara Identifikasi kebutuhan , Identifikasi Kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan 10 yang termasuk petani dan peternak Desa Sukamaju . Wawancara bersifat kualitatif, yaitu metode yang digunakan dengan maksud untuk memahami fenomena apa saja yang dialami oleh subjek . Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, didapatkan hasil berupa objek dari tujuan pengabdian masyarakat ini, yaitu hasil pertanian dan peternakan di Desa Sukamaju. Pelaksanaan pengabdian masyarkat dilakukan dengan pembuatan website, pelatihan, dan pendampingan penggunaan website sebagai media informasi dan media pemasaran hasil pertanian dan peternakan Desa Sukamaju. Tahap pelatihan dan pendampingan akan diberikan kepada

Aparat Desa Sukamaju untuk menunjang hasil dari website yang telah dibuat. Penggunaan website kedepannya akan dilakukan oleh Aparat Desa sebagai pelaksana kegiatan pemasaran dan perantara informasi antara masyarakat dengan hasil pertanian dan peternakan

Desa Sukamaju.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan praktikum kali ini kelompok kami membantu membuat Website Desa di Desa Sukamaju. Setelah melakukan wawancara dengan perangkat Desa Sukamaju dan melakukan observasi wilayah kami mendapatkan gambaran mengenai pembentukan Website desa dikarenakan website desa yang tidak berkembang dan dengan adanya website desa kami mengharapkan pemberdayaan yang ada di Desa Sukamaju dapat berkembang dengan baik dan dapat dikenal oleh banyak orang , pembuatan website desa ini juga bukan semata – mata hanya untuk membuat Desa Sukamaju dikenal oleh banyak orang tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan desa dari hasil UMKM masyarakat yang di kenal melalui website yang akan di buat dan ada beberapa hal yang didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Letak geografis Desa Sukamaju yang Strategis dan subur menjadikan mayoritas penduduk desanya sebagai petani dan peternak.
2. Masyarakat Desa Sukamaju melakukan pemasaran dan penyebaran informasi tentang hasil pertanian dan peternakan secara tradisional.
3. Penjualan secara tradisional menyebabkan jangkauan pasar hasil pertanian dan peternakan Desa Sukamaju menjadi kurang maksimal.
4. Media informasi desa belum ada sehingga menjadikan Desa Sukamaju kekurangan persebaran informasi tentang potensi pertanian dan peternakan.
5. Petani dan peternak Desa Sukamaju menginginkan hasil pertanian dan peternakan dijual langsung kepada masyarakat.

6. Petani dan peternak Desa Sukamaju menginginkan informasi tentang hasil pertanian dan peternakan lebih dikenal masyarakat luas.
7. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang kesiapan penerapan penggunaan teknologi website sebagai media informasi dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan.

Setelah melakukan wawancara dan pengambilan data, ditentukan rencana pengabdian masyarakat kami melakukan pembentukan website desa dengan bekerjasama bersama Diskominfo Kabupaten Ciamis , untuk sosialisasi dan pelatihan pengelolaan website desa dilaksanakan pada hari Rabu , 05 Juli 2023 yang di laksanakan di Desa Sukamaju , Untuk hasil Desa Sukamaju sudah memiliki website dan sudah dapat di akses oleh Masyarakat. Website ini berisi mengenai profil desa beserta pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat Desa Sukamaju , website ini juga dapat di akses oleh masyarakat umum diluar Desa Sukamaju.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pembuatan dan pengoperasian Website Desa Sukamaju didapatkan kesimpulan antara lain: (1) Desa Sukamaju yang sebelumnya tidak memiliki Website sekarang telah memiliki Website Desa dengan URL : <https://sukamaju-baregbeg.desa.id/> dan (2) perangkat desa yang sebelumnya mengalami kendala dalam pengoperasian dan pengelolaan Desa telah memiliki kemampuan dalam pengoperasian dan pengelolaan Website Desa. Saran dari kami yaitu agar Website

desa dapat dikelola dengan bijaksana dan mampu memberikan informasi penting terutama berkenaan dengan Pelayanan di Desa Sukamaju yang mulai dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu sarana Pelayanan yang dengan mudah di akses oleh Masyarakat kapanpun dan dimanapun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adler, David. 1999. *New Metric Handbook Planning and Design Data*. Architectural Press:Oxford.
- Azwar, S. 2019. *Penyusunan Skala Psikologi (II)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairus, Adira. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Jogjakarta: Pixelindo.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latifatul Dwi. 2022. Contoh penelitian kualitatif: <https://katadata.co.id/agung/berita/629eef2d1fd3a/51-contoh-penelitian-kualitatif-dari-berbagai-jurusan>  
Diakses pada tanggal 7 Juni 2022
- Moleong, Lexy. 2013. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rustiadi. Ernan, dkk. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan. Pustaka.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.



- Suwarlan E., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2019). Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 7(2).
- Yulikuspartono. 2009. *Konsep Dasar Program*, PT. Alex Media, Jakarta.

# **BAB 12**

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SDM DI DESA KERTAHARJA**

---

---

### **PENDAHULUAN**

Menurut Chamber, 1995 Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable* . Dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi lebih sebagai peningkatan kualitas SDM di Desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan *alternative* dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai *literature* dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Peningkatan kualitas SDM merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktif. Tujuan dari peningkatan kualitas SDM adalah menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1) Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa, “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.” Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Menurut Sumodiningrat, “Pemberdayaan masyarakat (society empowerment) ini merupakan suatu agenda konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang kemudian diharapkan di dalam pemberdayaan ini ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik itu di dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun juga di dalam bidang industri.”

### **2) Peningkatan Kualitas SDM**

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:244) pengertian sumber daya manusia adalah “Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya.” Menurut Danim (1996:44) Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan). Menurut Selo

Sumarjan (2009:43) yang dikutip oleh Sudarwan Danim (2012) bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kita inginkan dibedah atas dasar kualitas fisik (kesehatan, kekuatan jasmani, keterampilan dan ketahanan) dan kualitas non fisik (kemandirian, ketekunan, kejujuran dan akhlak). Menurut Prof. T.V. Rao, Peningkatan Kualitas SDM adalah proses di mana seseorang dalam sebuah organisasi dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Prosedur atau tahapan pelaksanaan dalam kegiatan praktek mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa dimulai dari (1) Observasi pendahuluan, (2) Identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa, (3) Pelaksanaan praktek mata kuliah dengan mitra dari pemerintahan desa yang sudah ditetapkan, dan (4) Penyusunan laporan praktek mata kuliah dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapatkan dalam praktek mata kuliah ini terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara dengan informan dalam kegiatan praktek mata kuliah, dan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari sumber referensi lain yang tidak terkait secara langsung untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut di analisis secara kualitatif berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan, dengan

demikian akan menghasilkan suatu kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas SDM Di Desa Kertaharja**

Pemberdayaan masyarakat (society empowerment) merupakan suatu agenda konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan yang kemudian diharapkan di dalam pemberdayaan ini ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri, baik itu di dalam bidang pendidikan, ekonomi, ataupun juga di dalam bidang industri." Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan di Desa Kertaharja pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertaharja pada saat ini sudah berjalan, Ruang Lingkup pemberdayaan masyarakat di desa Kertaharja:

1. Bidang lingkungan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang ekonomi

Adapun beberapa program pemberdayaan masyarakat yang sudah / sedang dilaksanakan di Desa Kertaharja diantaranya:

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan non alam. Dengan membentuk desa siaga bencana, dengan adanya pelatihan mitigasi bencana. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan agar dapat meminimalisir adanya korban bencana alam.

- b) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan  
Dengan adanya pelatihan peningkat kapasitas posyandu yang dilakukan oleh kader posyandu. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan diharapkan bahwa dapat memperbaiki kesehatan di Desa Kertaharja .
- c) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, dengan adanya pelatihan BUMDes serta BUMDesa yang dikelola oleh beberapa masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas SDM di desa Kertaharja agar lebih baik lagi. Adapun empat ciri utama SDM yang berkualitas: memiliki kepribadian yang matang dan berkembang (mature and developing personality), mempunyai keterampilan membangkitkan minat peserta didik, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, dan sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.

#### Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertaharja

- Prinsip Kesetaraan: adanya kesetaraan/ kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga desa yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.
- Partisipasi: program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat yaitu program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat.

- Keswadayaan / kemandirian: menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain.
- Berkelanjutan : program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri.

### 3) Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertaharja

Adapun permasalahan yang dihadapi Desa Kertaharja dalam pemberdayaan masyarakat :

- a. Kurangnya komitmen
- b. Masyarakat karena kekurangan pemahaman.
- c. Terjadinya perubahan mendadak pola masyarakat, meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, dan kondisi geografis.
- d. Kurangnya koordinasi ketika hendak memutuskan suatu permasalahan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertaharja**

Pada saat ini partisipasi masyarakat dalam beberapa program sudah lebih baik dari tahun kemarin karena masyarakat sudah berfikir tentang pentingnya pemberdayaan tersebut. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat masih dalam tahap perbaikan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Pengangkatan petugas pemberdayaan masyarakat dulu bisa dipilih berdasarkan koneksi, berbeda dengan sitem pada saat ini yang mana pengangkatan petugas lebih melihat potensi dan juga

mepertimbangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

## **KESIMPULAN**

Pada saat ini partisipasi masyarakat dalam beberapa program sudah lebih baik dari tahun kemarin karena masyarakat sudah berfikir tentang pentingnya pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pada wilayah pedesaan. Sehingga masyarakat desa bukan lagi sebagai obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Volume I, Munawar Noor No 2, Juli 2011  
Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan Volume 01 Nomor 01,  
Desember 2018 <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE> Diterima: 13/11/2018.



# BAB 13

## PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DI DESA BENDASARI KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS

---

---

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Atau, dengan kata lain, menjadikannya “berpower” atau memandirikan dan memampukan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Dalam konsepsi ini Kartasasmita mengajukan beberapa pendekatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu, pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih konkret, selain menciptakan “atmosfer” bagi bekerjanya pemberdayaan, juga menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Ketiga, makna melindungi, yakni melindungi masyarakat yang lemah (kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat) (Kuswandoro, 2016).

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan kepada proses, sehingga partisipasi

atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Dengan adanya Pemberdayaan wanita di Desa Bendasari Kecamatan Sadananya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan dikelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk kesejahteraan para petani dalam meningkatkan pendapatan keluarga sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup dan kemandirian wanita.

Peran wanita dalam pertanian termasuk dalam ketahanan pangan dan gizi keluarga. Ketahanan pangan dapat mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan usaha pangan bagi wanita tani, sehingga wanita harus pandai mengatur, mengelola penghasilan yang relatif rendah agar mencukupi kebutuhan keluarga terutama sandang pangan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kelompok Wanita Tani di Desa Bendasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis berjumlah 15 orang sudah termasuk Ketua (Data KWT Desa Bendasari, 2023). Adapun tujuan dibentuknya KWT adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan. Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usahatani yang lebih baik lagi. Aktivitas usahatani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan-peningkatan dalam produktivitas usahatani yang pada

gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya (BPLPP, 1990: 23).

Soetrisno (1997: 68) berpendapat bahwa dengan diciptakan wadah atau organisasi bagi perempuan Indonesia dan telah digariskan bentuk-bentuk peran perempuan dalam pembangunan, maka pemerintah dengan demikian mengharapkan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan dapat meningkat. Wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi nyata pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka. Kenyataannya sekitar 50 persen wanita tani di samping bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja di ladang atau di sawah bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti KWT. Hal ini dilakukan karena mereka berharap dengan adanya peran atau keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas usaha akan meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan anggota KWT dalam perekonomian Desa Bendasari.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Pemberdayaan**

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar

Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim (2009:3), menyatakan bahwa : Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

Kemudian, menurut Edi Suharto (2010:60), “Pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

Sejalan dengan kutipan di atas, Djohani dalam Anwas (2014:49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Sehubungan dengan hal tersebut, Anwas (2014:48-49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan

dengan kekuasaan adalah terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Akan tetapi, kadang-kadang masyarakat tidak menyadari atau daya tersebut belum dapat diketahui. Oleh karena itu, daya masyarakat harus digali dan kemudian dikembangkan.

## **B. Konsep Kelompok Wanita Tani (KWT)**

Pada umumnya wanita itu memiliki peran ganda. Sebagai ibu rumah tangga tetapi mempunyai peran yang lain dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga dan dalam dasawarsa terakhir Nampak semakin menonjol. Sehingga muncul istilah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga lewat Bertani dengan Wanita Tani

Wanita desa memiliki peranan aktif dalam bidang ekonomi, yaitu Bertani, berkebun, beternak dan berdagang. Bahkan dirumah, para wanita desa bekerja membuat *industry* rumah tangga yang berupa peralatan dan makanan. Peranan perempuan itu juga dituntut oleh sistem sosial yang ada. Diberbagai daerah banyak ditemukan sistem sosial seperti sistem bilennial yaitu sistem yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan saling mengisi.

Hubungan kerja dalam proses produksi ternyata tidak hanya ditentukan oleh perbedaan jenis kelamin melainkan karena ada kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh sumber sumber strategis yang melampaui perbedaan-perbedaan gender.

Arifin (2003) menyatakan bahwa peran wanita dalam pertanian merupakan salah satu strategi pemerataan dalam pembangunan pertanian. Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu wadah bagi petani dimana para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang bergerak dalam kegiatan pertanian. KWT berbeda dengan kelompok tani yang lainnya, dalam pembinaannya KWT diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian. Selain itu, KWT juga diharapkan agar dapat berperan pada pemberdayaan ekonomi dengan cara mendorongnya untuk dapat mencapai kemandirian ekonomi.

## **METODE**

Metodologi dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif.

Menurut Bodan dan Taylor (seperti dikutip Moleong, 2010: 4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu, penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur atau penelaahan terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dengan adanya program kegiatan praktik mata kuliah pemberdayaan desa dan pembangunan masyarakat mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar, terutama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Bendasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, yang diawali dengan melakukan pengenalan awal terhadap kelompok wanita tani dengan mengamati kegiatan dan memahami tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan pertanian, seperti teknik pertanian yang digunakan, manajemen lahan, penggunaan alat-alat pertanian, dan sistem pengairan yang mereka terapkan yang hasilnya dapat budidayakan.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kelompok wanita tani diantaranya keterbatasan dana, keterbatasan akses dalam mendapatkan pupuk, perubahan iklim, dan rendahnya pemahaman tentang teknologi pertanian modern.

Dalam upayanya memajukan sektor pertanian di desa mereka, kelompok wanita tani menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelompok wanita tani adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dapat berdampak bagi peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam bercocok tanam. Sebagai akibatnya, mereka sering kali tidak dapat menerapkan teknik pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, kelompok wanita tani juga menghadapi hambatan dalam permodalan maupun mitra pihak ke-3 yaitu perbankan. Mereka terbatas dalam mendapatkan modal usaha yang memadai untuk membeli bibit yang berkualitas, pupuk, dan alat pertanian modern. Keterbatasan ini membatasi potensi pertumbuhan dan produktivitas mereka.

Namun, meskipun menghadapi berbagai masalah ini, kelompok wanita tani di Desa Bendasari tidak menyerah begitu saja. Mereka berusaha mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Pertama, mereka melakukan upaya kolaborasi dengan lembaga pemerintah setempat untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan dalam teknik pertanian modern. Mereka berpartisipasi dalam pelatihan tentang cara menggunakan pupuk organik, praktik irigasi yang efisien, dan cara mengelola hama dan penyakit tanaman secara alami.

Dengan adanya kerjasama antara wanita tani, pemerintah, masyarakat, dan petani, diharapkan dapat meningkatkan peran wanita dalam pertanian dan memperbaiki kondisi pertanian secara keseluruhan. Dukungan yang holistik dan inklusif dari berbagai pihak menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan dan kemajuan dalam sektor pertanian.

Pengembangan Kelompok Wanita Tani ini sejalan dengan tujuan SDGs yang relevan antara lain yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan (Goal 1): Salah satu tujuan utama program kelompok wanita tani adalah mengurangi kemiskinan di kalangan wanita tani dan masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan wanita tani dalam meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya produktif, pelatihan, modal, dan pasar.
2. Pemberdayaan Wanita (Goal 5): Tujuan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh wanita dan anak perempuan, termasuk wanita tani. Program kelompok wanita tani dapat memperkuat



- peran dan posisi wanita dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
3. Ketahanan Pangan (Goal 2): Program kelompok wanita tani dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, keberlanjutan sistem pertanian, dan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Wanita tani memiliki peran penting yang mendasar dalam produksi pangan dan keamanan pangan di tingkat lokal.
  4. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Goal 8): Program kelompok wanita tani dapat membantu mencapai tujuan ini dengan meningkatkan produktivitas wanita tani terhadap peluang kerja yang layak dan produktif, serta meningkatkan kewirausahaan wanita tani. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
  5. Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan (Goal 11): Tujuan ini berfokus pada pembangunan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Program kelompok wanita tani dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memperkuat komunitas pedesaan, membangun kapasitas wanita tani dalam menghadapi perubahan

iklim, dan mendorong penggunaan praktik pertanian berkelanjutan.



**Gambar 1.** *Pelatihan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Di Desa Bendasari*

Dengan adanya isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani di Desa Bendasari, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti sebagai partisipan dalam Program Ketahanan Pangan Pelatihan Budidaya Cabe (Gambar 1), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bercocok tanam cabe, dengan pelatihan yang memadai, wanita tani dapat mengoptimalkan produksi cabe mereka. Mereka mempelajari teknik penanaman yang efisien, penggunaan pupuk yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, dan praktik bercocok tanam yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan jumlah dan kualitas cabe yang dihasilkan.

Program ini juga bertujuan untuk mendorong diversifikasi pangan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pengetahuan wanita tani dalam budi daya cabe, mereka dapat memperluas

varietas tanaman yang ditanam di wilayah mereka. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan meningkatkan keanekaragaman pangan di masyarakat.

Dengan dukungan pemerintah desa dalam memfasilitasi akses kelompok wanita tani ke pasar lokal maupun regional, sehingga mereka dapat meningkatkan penjualan produk pertanian mereka dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Adanya kerjasama yang kuat antara kelompok wanita tani, dan Pemerintah Desa, kami yakin bahwa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertanian wanita yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan.

## **KESIMPULAN**

Peran wanita dalam pertanian sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi keluarga. Wanita tani harus memiliki kemampuan mengatur dan mengelola penghasilan yang rendah agar mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan sandang dan pangan. Program Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran wanita dalam pembangunan pertanian.

Namun, wanita tani juga menghadapi berbagai hambatan-hambatan yang ditemui oleh kelompok tani diantaranya keterbatasan dana, keterbatasan akses dalam mendapatkan pupuk, perubahan iklim, dan rendahnya pemahaman tentang teknologi pertanian modern, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dapat berdampak bagi peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam bercocok tanam, serta

hambatan dalam permodalan maupun mitra pihak ke-3 yaitu perbankan.

Hal ini membatasi kemampuan mereka dalam menerapkan teknik pertanian modern yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meskipun demikian, kelompok wanita tani tetap berusaha mencari solusi dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah atau swasta dalam mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pertanian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. Bandung: Alfabata.
- Arifin B. 2003. Pembangunan Pertanian (Buku Ajar). Universitas Lampung. Lampung.
- Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan masyarakat, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal.3
- Badan Pendidikan dan Latihan Penyuluh Pertanian (BPLPP). 1990. Gema Penyuluhan Pertanian no. 34 Departemen Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.
- Edi Suharto, Ph.D., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. Ke-4, Desember 2010), h. 60.
- Kartasmita, G(1996). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah 14 Maret 1997

- Kuswandro W. E. 2016. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi (PDF Download Available). Available from: [https://www.researchgate.net/publication/311101048\\_Strategi\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat\\_Desa\\_Berbasis\\_Partisipasi](https://www.researchgate.net/publication/311101048_Strategi_Pemberdayaan_Masyarakat_Desa_Berbasis_Partisipasi) [accessed Oct 29 2017]
- Minarni, E. W., Utami, D. S., & Prihatiningsih, N. (2017). Pemberdayaan kelompok wanita tani melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya sayuran organik dataran rendah berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 147-154.
- Mustanir, A., Muhannah, M., & Sellang, K. (2022, August). *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Mekar Kelurahan Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang*. In *Seminar Nasional Paedagoria* (Vol. 2, pp. 180-189).
- Moleong J. L. (2010), *Metodologi Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurmayasari, D., & Ilyas, I. (2014). Peran Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Laras Asri Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif di Dusun Daleman Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(2).
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, & Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius.

# BAB 14

## IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

---

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua hal yang saling terkait dan sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi pedoman utama dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan di tingkat global.

*Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa sebagai upaya terpadu dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 18 tujuan dengan 22 indikator pemenuh kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa. *SDGs* menjadi arah kebijakan pembangunan desa sampai tahun 2030 yang ditetapkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah upaya terpadu mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa yang

berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam pencapaian SDGs. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kesempatan, sumber daya, dan keterlibatan aktif kepada masyarakat desa dalam proses pembangunan. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa dapat memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, serta memperoleh manfaat langsung dari pembangunan yang berlangsung. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada SDGs memberikan peluang dan tantangan yang kompleks. Dalam satu sisi, terdapat potensi besar dalam memanfaatkan sumber daya lokal, membangun kapasitas masyarakat, dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Di sisi lain, ada tantangan dalam mengatasi kesenjangan sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta menghadapi perubahan iklim dan kerentanan lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, perlu adanya panduan atau pedoman praktikum yang dapat membantu para praktisi, akademisi, dan pemerhati dalam melaksanakan kegiatan yang efektif dan berkelanjutan. Pedoman praktikum ini akan memberikan arahan dan bimbingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola program pembangunan desa yang berbasis masyarakat. Pembangunan desa sebaiknya

diselenggarakan secara bersamaan dengan pembangunan masyarakatnya agar pembangunan di tahap pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) prinsip dasar yang saling berkesinambungan meliputi Prinsip Kebutuhan, Prinsip Partisipasi, Prinsip Keterpaduan, Prinsip Berkelanjutan, Prinsip Keserasian, Prinsip Kemampuan Sendiri, Prinsip Kaderisasi. Pemerintahan desa ini memiliki tema “Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Sustainable Development Goals*” yang berfokus pada SDGs Desa yang bertempat di Desa Mekarjadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Fokus pembangunan desa adalah pada peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, dan transportasi, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pembangunan desa juga harus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, industri kecil dan menengah, serta sektor usaha lainnya. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak juga harus ditingkatkan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan



keputusan, pelestarian lingkungan, akses informasi dan teknologi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga nirlaba, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi faktor-faktor penting dalam pembangunan desa.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan masyarakat di mana masyarakat sendiri berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat agar dapat memaksimalkan identitas, martabat, dan kesejahteraan mereka. Masyarakat harus menjadi agen pembangunan, bukan hanya penerima manfaat atau objek. Pemberdayaan masyarakat melibatkan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumberdaya.

### **SDGs (Sustainable Development Goals)**

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah panduan yang digunakan dalam kerangka pembangunan dan perundingan antarnegara di dunia. SDGs merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals, MDGs) yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2015. SDGs bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat secara global. SDGs Desa mencakup 18 tujuan dan sasaran pembangunan yang melibatkan desa, termasuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa yang sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa,

infrastruktur inovatif, serta desa yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, kedamaian, keadilan, dan kelembagaan yang dinamis serta budaya adaptif.

Pencapaian SDGs Desa dalam konteks Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan, dan oleh karena itu, penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan untuk mendukung 10 SDGs desa yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Ini termasuk upaya untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, partisipasi perempuan, energi bersih, pertumbuhan ekonomi merata, konsumsi dan produksi berkelanjutan, perdamaian, keadilan, kemitraan pembangunan desa, serta kelembagaan desa yang adaptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis adalah upaya yang mengintegrasikan konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus dari pemberdayaan masyarakat di desa ini difokuskan pada industri kecil olahan makanan, khususnya Lanting.

Dari hasil observasi lapangan, terdapat beberapa kendala dalam industri UMKM Lanting di Desa Mekarjadi. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya optimalisasi dalam pemasaran. Selain itu, alat produksi juga belum lengkap dan memerlukan peralatan tambahan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, kami memberikan saran dan bantuan dalam beberapa aspek, seperti:

1. Membuat akun online shop khusus di platform media

sosial seperti Instagram, Facebook, dan Tiktok.

2. Memberikan bantuan dalam proses produksi Lanting.
3. Membantu dalam memasarkan produk secara langsung melalui mitra usaha, seperti warung dan toko-toko lokal.

Lanting adalah produk olahan makanan ringan yang terbuat dari singkong dan memiliki berbagai varian rasa. Awalnya, Lanting hanya memiliki rasa gurih dan asin, tetapi sekarang telah menghadirkan variasi rasa seperti asin, pedas, dan keju. Lanting merupakan produk khas Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan Desa Mekarjadi di Kabupaten Ciamis juga memiliki salah satu pelaku usaha produksi Lanting.

Pada era digital ini, media sosial menjadi salah satu alat utama dalam pemasaran. Dalam konteks industri kecil seperti Lanting, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya telah menjadi platform penting untuk mempromosikan produk dan berkomunikasi dengan pelanggan. Distribusi juga didukung oleh teknologi, memungkinkan peningkatan kuantitas produk yang sampai ke tangan konsumen.

Dalam konteks penggunaan media sosial, ada beberapa platform yang digunakan untuk mempromosikan produk UMKM seperti Lanting. Media sosial memiliki berbagai manfaat, termasuk efisiensi dalam anggaran pemasaran, jangkauan yang luas, akses yang mudah, dan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha UMKM memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa menjadi panduan untuk pembangunan di tingkat desa. Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, seperti industri Lanting di Desa Mekarjadi, dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran telah menjadi tren dalam bisnis saat ini, membantu pelaku usaha dalam mencapai pasar yang lebih luas dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pemanfaatan media sosial dapat membantu UMKM dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Karnoto, S. B., Taryani, A., Rahma, N. N., Alam, N. S., Putri, R. Y. E., & Belindasari, R. R. A. D. (2022). Mewujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan di Jawa Tengah dengan Dana Desa (2019-2020). \*Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah\*, 23(1), 112-125.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. , 2, 1-25.
- Rafii, A., Indarajaya, K., Hikmah, N., & Sos, S. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). \*Journal Administrasi Publik (JAP)\*, 6(1), 10-15.

Makalah Konsep Sustainable Development Goals (SDGs).  
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah  
Kebijakan Kesehatan Nasional.  
[<https://docplayer.info/amp/73072922-Makalah-konsep-sustainable-development-goals-sdgs-makalah-ini-disusun-untuk-memenuhi-tugas-mata-kuliah-kebijakan-kesehatan-nasional.html>](<https://docplayer.info/amp/73072922-Makalah-konsep-sustainable-development-goals-sdgs-makalah-ini-disusun-untuk-memenuhi-tugas-mata-kuliah-kebijakan-kesehatan-nasional.html>)

SDGs Desa: Pengertian, Tujuan, dan Sasaran."  
[<https://tirtorahayukulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2021/6/24/sdgs-desa-pengertian-tujuan-dan-sasaran>](<https://tirtorahayukulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2021/6/24/sdgs-desa-pengertian-tujuan-dan-sasaran>)

# PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berbasis Sustainable Development Goals



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia  
Pondok Karisma Residence  
Jalan Rafflesia VI D.151  
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

